

LAPORAN EVALUASI KINERJA SATPOLPP KOTA SERANG TAHUN 2025 TRIWULAN I

NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Target		Triwulan I												Unit PD Penang ung jawab	Permasal ahan	Solusi	Rencana Perbaikan	
										Januari				Februari				Maret								
										Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran						
								K	(Rp)	Realis asi (K)	Capaia n (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realis asi (K)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realis asi (K)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/9 *100	13	14=13/10 *100	15	16=15/9 *100	17	18=17/10 *100	19	20=19/9 *100	21	22=21/10 *100	23	24	25	26	
			Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat				%		91,96	Rp17.566.781.621		0,00%	Rp746.748.614	4,25%		0,00%	Rp1.819.105.319	10,36%	63,40	68,94%	Rp3.508.259.251	19,97%	Kepala SatpolPP			
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolPP				Nilai Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Poin	Nilai Hasil Penilaian SAKIP Satpol PP (0-100)	75,89	Rp9.495.636.814	77,60	102,25 %	Rp219.232.934	2,31%	77,60	102,25 %	Rp612.044.909	6,45%	77,60	102,25 %	Rp1.735.533.161	18,28%	Kepala SatpolPP	Nilai hasil untuk evaluasi AKIP Satpol PP Tahun 2025 belum di evaluasi	Menggunakan nilai evaluasi AKIP Satpol PP Tahun 2024 sebagai data sementara	Melengkapi data dan dokumen pendukung pelaksanaan evaluasi tahun berjalan, seperti perencanaan, pengukuran, dan tindak lanjut kinerja.	
1		Meningkatnya Capaian Kinerja Utama SatpolPP			Rata - Rata Tingkat Capaian IKU SatpolPP	Nilai	Nilai Hasil Capaian IKU Satpol PP (0-100)	95,48	Rp9.495.636.814	63,40	66,40%	Rp219.232.934	2,31%	63,40	66,40%	Rp612.044.909	6,45%	63,40	66,40%	Rp1.735.533.161	18,28%	Kepala SatpolPP				
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Poin	Skor hasil survai	85	Rp9.495.636.814	21,00	24,71%	Rp219.232.934	2,31%	21,00	24,71%	Rp612.044.909	6,45%	21,00	24,71%	Rp1.735.533.161	18,28%	Sekretaris				
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD dibagi Target ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dikali 100%	100	Rp271.988.600	23,53	23,53%	Rp0	0,00%	23,53	23,53%	Rp22.872.560	8,41%	23,53	23,53%	Rp44.168.560	16,24%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD (Rentra, Renja beserta perubahannya, IKU dan PK	5	Rp120.494.300	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	20,00%	Rp9.240.800	7,67%	1	20,00%	Rp12.280.800	10,19%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Rp9.489.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Mengoptimalkan perencanaan awal agar kegiatan berikutnya lebih efisien.	
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp7.536.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 3	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Mengoptimalkan perencanaan awal agar kegiatan berikutnya lebih efisien.	
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Rp4.711.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Mengoptimalkan perencanaan awal agar kegiatan berikutnya lebih efisien.	
5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp4.711.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 3	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Mengoptimalkan perencanaan awal agar kegiatan berikutnya lebih efisien.	
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja (Evlap Renja, LKJIP	7	Rp77.046.500	0	0,00%	Rp0	0,00%	3	42,86%	Rp13.631.760	17,69%	3	42,86%	Rp31.887.760	41,39%	Kepala Sub Bag				

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dan lainnya) laporan koordinasi capaian kinerja													Keuangan dan PEP					
7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah dokumen profil PD	1	Rp48.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Mengoptimalkan perencanaan awal agar kegiatan berikutnya lebih efisien.
2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dibagi Target ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dikali 100%	100	Rp7.576.447.811	8,33	8,33%	Rp174.855.511	2,31%	16,66	16,66%	Rp356.518.490	4,71%	41,11	41,11%	Rp1.386.061.470	18,29%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah ASN yang termuat dalam dokumen penerimaan gaji dan TPP setiap bulannya	85	Rp7.488.453.111	7	8,24%	Rp174.855.511	2,34%	14	16,47%	Rp350.438.590	4,68%	22	25,88%	Rp1.364.441.570	18,22%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
2					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi	1	Rp9.994.700	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp6.079.900	60,83%	1	100,00%	Rp6.079.900	60,83%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
3					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/sem esteran dan laporan koordinasi	4	Rp78.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	25,00%	Rp15.540.000	19,92%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
3					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dibagi target ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dikali 100%	100	Rp46.816.000	0,00	0,00%	Rp0	0,00%	19,09	19,09%	Rp2.222.000	4,75%	28,57	28,57%	Rp11.722.000	25,04%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	2	Rp4.444.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	50,00%	Rp2.222.000	50,00%	1	50,00%	Rp2.222.000	50,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	jumlah laporan terkait penatausahaan barang milik daerah	5	Rp42.372.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	20,00%	Rp9.500.000	22,42%	Kepala Sub Bag Umpeg			
4					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian PD dibagi target ketersediaan penunjang administrasi PD dikali 100%	100	Rp18.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Menyelesaikan proses administrasi dan persiapan kegiatan agar dapat dilaksanakan tepat waktu pada TW 4. 2. Memastikan ketersediaan dokumen perencanaan dan DPA sudah siap digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Bagian Umpeg dan Subbag Keuangan) untuk percepatan realisasi anggaran.
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12	Rp18.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Mempercepat proses administrasi pengadaan agar dapat dilaksanakan tepat waktu pada TW 4.

																								2. Melakukan finalisasi spesifikasi teknis, ukuran, dan jumlah kebutuhan pakaian dinas serta atributnya. 3. Melaksanakan proses pengadaan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku (e-purchasing atau penyedia).	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg	Tidak memiliki target kinerja dan anggaran di tahun 2025	Dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2026	1. Memasukkan kembali kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA Tahun 2026. 2. Melakukan penelaahan kebutuhan dan urgensi kegiatan agar mendapatkan prioritas penganggaran pada tahun berikutnya. 3. Menyiapkan rancangan konsep kegiatan dan dokumen pendukung sejak triwulan IV Tahun 2025.
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi umum perangkat daerah	%	Reakisasi ketersediaan penunjang administrasi umum PD dibagi Target ketersediaan penunjang administrasi umum PD dikali 100%	100	Rp557.667.332	12,90	12,90%	Rp14.243.000	2,55%	21,01	21,01%	Rp58.517.100	10,49%	32,35	32,35%	Rp102.691.016	18,41%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2	Rp83.610.732	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	50,00%	Rp1.832.000	2,19%	1	50,00%	Rp21.940.916	26,24%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	Rp2.389.300	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan pendataan kebutuhan peralatan rumah tangga yang diperlukan di lingkungan kantor. 2. Menyusun rencana pengadaan dan spesifikasi teknis peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan. 3. Melaksanakan proses pengadaan sesuai jadwal pada Triwulan II. 4. Melakukan pemeriksaan dan pendistribusian peralatan rumah tangga setelah diterima. 5. Menyusun laporan realisasi pengadaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor	1	Rp45.578.800	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	100,00%	Rp7.841.800	17,20%	1	100,00%	Rp7.841.800	17,20%	Kepala Sub Bag Umpeg			
4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	Rp47.857.300	1	100,00%	Rp3.938.000	8,23%	1	100,00%	Rp11.888.300	24,84%	1	100,00%	Rp11.888.300	24,84%	Kepala Sub Bag Umpeg			
5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Rp56.167.200	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	50,00%	Rp4.000.000	7,12%	1	50,00%	Rp10.460.000	18,62%	Kepala Sub Bag Umpeg			
6				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp30.000.000	1	8,33%	Rp2.500.000	8,33%	2	16,67%	Rp5.000.000	16,67%	3	25,00%	Rp5.000.000	16,67%	Kepala Sub Bag Umpeg			

7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Rp241.304.000	1	8,33%	Rp7.805.000	3,23%	2	16,67%	Rp27.955.000	11,58%	3	25,00%	Rp34.010.000	14,09%	Kepala Sub Bag Umpeg			
8				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doumen	jumlah dokumen pelaksanaan SPBE	3	Rp50.760.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	33,33%	Rp11.550.000	22,75%	Kepala Sub Bag Umpeg			
6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan hasil pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Realisasi ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100%	100	Rp129.154.800	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2 dan TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. 2. Menyusun rencana pengadaan dan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan serta pagu anggaran yang tersedia. 3. Melaksanakan proses pengadaan barang sesuai jadwal pada Triwulan II dan Triwulan IV. 4. Melakukan verifikasi dan penerimaan hasil pengadaan sesuai ketentuan. 5. Menyusun laporan realisasi pengadaan dan memastikan barang hasil pengadaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	jumlah unit kendaraan dinas jabatan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas lapangan	1	Rp42.754.700	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan identifikasi kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai fungsi dan prioritas kegiatan. 2. Menyusun spesifikasi teknis dan rencana pengadaan kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Melaksanakan proses pengadaan kendaraan pada Triwulan IV sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 4. Melakukan pemeriksaan dan serah terima kendaraan hasil pengadaan. 5. Menyusun laporan realisasi pengadaan dan memastikan kendaraan siap digunakan untuk mendukung operasional lapangan.

2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	6	Rp86.400.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.2. Menyusun rencana pengadaan serta spesifikasi teknis peralatan dan mesin yang dibutuhkan.3. Melaksanakan proses pengadaan sesuai jadvwl pada Trivulan II.4. Melakukan pemeriksaan, pemasangan, dan pendistribusian sarana prasarana setelah diterima.5. Menyusun laporan hasil realisasi pengadaan dan memastikan sarana prasarana berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional kantor.
7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Realisasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	100	Rp133.700.000	0,00	0,00%	Rp7.634.423	5,71%	33,33	33,33%	Rp16.358.809	12,24%	33,33	33,33%	Rp26.299.165	19,67%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Rp8.100.000	1	100,00%	Rp600.000	7,41%	1	100,00%	Rp2.000.000	24,69%	1	100,00%	Rp2.000.000	24,69%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp96.000.000	1	8,33%	Rp6.834.423	7,12%	2	16,67%	Rp13.958.809	14,54%	3	25,00%	Rp20.699.165	21,56%	Kepala Sub Bag Umpeg			
3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	Rp29.600.000	1	50,00%	Rp200.000	0,68%	1	50,00%	Rp400.000	1,35%	1	50,00%	Rp3.600.000	12,16%	Kepala Sub Bag Umpeg			
8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	Realisasi ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dibagi target ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dikali 100%	100	Rp761.862.271	8,33	8,33%	Rp22.500.000	2,95%	16,33	16,33%	Rp155.555.950	20,42%	28,07	28,07%	Rp164.590.950	21,60%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	Rp219.628.075	1	20,00%	Rp7.250.000	3,30%	1	20,00%	Rp64.823.075	29,51%	1	20,00%	Rp72.248.075	32,90%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2				Penyediaan Jasa Dinas Operasional, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14	Rp295.394.196	4	28,57%	Rp15.250.000	5,16%	5	35,71%	Rp84.022.875	28,44%	6	42,86%	Rp85.632.875	28,99%	Kepala Sub Bag Umpeg			
3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit peliharaan dan mesin lainnya yg dipelihara	37	Rp26.840.000	5	13,51%	Rp0	0,00%	7	18,92%	Rp6.710.000	25,00%	9	24,32%	Rp6.710.000	25,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah unit bangunan dan gedung yang dipelihara	1	Rp220.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2 dan TW 3	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan identifikasi dan penilaian kondisi gedung kantor serta bangunan yang memerlukan pemeliharaan atau rehabilitasi. 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan pemeliharaan sesuai kebutuhan prioritas. 3. Melaksanakan kegiatan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam kab/kota yang ditangani	%	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang masuk dikali 100%	100	Rp5.500.38 8.200	10,54	10,54%	Rp363.54 4.440	6,61%	12,34	12,34%	Rp773.129. 880	14,06%	9,81	9,81%	Rp1.159.40 4.320	21,08%	Kepala PPPU dan Trantib	Sebagain besar masih dalam proses pelaksana aan kegiatan	Mengoptim alkan pelaksanaa n kegiatan	1. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih berjalan. 2. Meningkatkan koordinasi antar petugas lapangan dan bidang terkait. 3. Mengoptimalkan sistem pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. 4. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab petugas dalam penanganan kasus. 5. Melakukan evaluasi rutin agar kegiatan berjalan sesuai target.
9				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	Pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SatpolPP dikali 100%	100	Rp5.320.16 1.800	10,14	10,14%	Rp363.54 4.440	6,83%	15,11	15,11%	Rp768.379. 880	14,44%	20,48	20,48%	Rp1.147.30 4.320	21,57%	Kepala Seksi Dalop	Sebagain besar dalam proses pelaksana aan kegiatan	Mengoptim alkan pelaksanaa n kegiatan	1. Mempercepat penyelesaian kegiatan dan tindak lanjut laporan pelanggaran K3. 2. Meningkatkan koordinasi antar petugas dan bidang terkait. 3. Mengoptimalkan pengawasan lapangan untuk mempercepat penyelesaian kasus. 4. Melakukan evaluasi rutin atas progres penanganan pelanggaran setiap bulan.
					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	Jumlah petugas Linmas di Daerah yang tersedia dibagi 1 wilayah kerja Kota (55 Linmas x 67 Kelurahan) dikali 100%	100		0	0,00%		#DIV/0!	0	0,00%		#DIV/0!	0	0,00%		#DIV/0!	Kepala Seksi Linmas			1. Melakukan pendataan ulang jumlah Linmas aktif di setiap kelurahan.2. Menyusun rencana kebutuhan dan rekrutmen Linmas sesuai standar (55 Linmas x 67 kelurahan).3. Melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk memastikan keberadaan dan kesiapsiagaan Linmas.4. Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan Linmas secara bertahap.
1				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp16.656.0 00	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Linmas	Jadwal pelaksana an kegiatan di TW 2	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan koordinasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Triwulan II. 2. Menyiapkan bahan, data, dan undangan koordinasi lebih awal agar kegiatan tidak tertunda. 3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk memastikan kehadiran dan hasil yang optimal. 4. Menyusun dan menindaklanjuti dokumen hasil koordinasi tepat

																									waktu sesuai rencana kerja.
2				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp39.451.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Linmas	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Triwulan II. 2. Menyiapkan bahan, data, dan dokumen pendukung kegiatan sejak awal agar pelaksanaan berjalan lancar. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak kelurahan dan unsur Linmas untuk mendukung kegiatan pemberdayaan. 4. Memastikan penyusunan dokumen hasil pemberdayaan dilakukan tepat waktu setelah kegiatan selesai.
3				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Jumlah Petugas Satpol PP dan Linmas yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai Standard	139	Rp219.348.800	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi SDA	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM sesuai jadwal pada Triwulan II. 2. Menyiapkan materi pelatihan, narasumber, dan peserta lebih awal agar pelaksanaan tepat waktu. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan bidang terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan. 4. Menyusun laporan hasil kegiatan segera setelah pelatihan selesai.
4				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang tersedia	3	Rp4.696.561.400	0	0,00%	Rp363.544.440	7,74%	1	33,33%	Rp728.129.880	15,50%	1	33,33%	Rp1.093.704.320	23,29%	Kepala Seksi Dalop			
5				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteramandan Ketertiban Umum yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dibuat dan Dimutakhirkan	1	Rp1.825.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Dalop			
6				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	17	Rp109.768.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	2	11,76%	Rp9.250.000	8,43%	5	29,41%	Rp13.700.000	12,48%	Kepala Seksi Dalop			
7				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	50	Rp214.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	5	10,00%	Rp29.400.000	13,74%	10	20,00%	Rp38.300.000	17,90%	Kepala Seksi Dalop			
8				Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Jumlah laporan layanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum	1	Rp20.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Dalop	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4,	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang	1. Menyiapkan mekanisme dan prosedur penanganan klaim masyarakat sejak

				Peraturan Kepala Daerah			terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang tersedia														akan tetapi atas dasar klaim dari masyarakat yang mendapatkan kerugian materiil maupun pengobatan akibat penegakan perda dan perkada	telah ditentukan	awal agar respons cepat saat ada laporan. 2. Melakukan koordinasi dengan bagian hukum, keuangan, dan bidang terkait untuk memastikan pelaksanaan layanan. 3. Mendokumentasikan setiap laporan dan tindak lanjut penanganan kerugian masyarakat sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan		
9				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKetentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteramandan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum sesuai Standard	11	Rp2.551.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Dalop	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan TW 2	1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar seluruh pengadaan dan pemeliharaan selesai sesuai target pada Triwulan II. 2. Mempercepat proses administrasi dan distribusi barang agar tidak terjadi keterlambatan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan penyedia dan bagian pengadaan untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas sarana prasarana. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan secara berkala.
10				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perkada	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dibagi jumlah pelanggaran PERDA/PERKADA dikali 100%	100	Rp172.926.400	0,00	0,00%	Rp0	0,00%	12,34	12,34%	Rp4.750.000	2,75%	18,75	18,75%	Rp12.100.000	7,00%	Kepala seksi Penegakan Perundangan			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala seksi Penegakan Perundangan	Tidak memiliki target kinerja dan anggaran di tahun 2025	Dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2026	1. Mengusulkan kembali kegiatan sosialisasi penegakan Perda/Perkada dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026. 2. Menyusun rencana kebutuhan, sasaran, dan materi sosialisasi agar kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal di tahun berikutnya. 3. Melakukan koordinasi dengan bidang perencanaan dan keuangan untuk memastikan kegiatan terakomodir dalam RKA tahun 2026.

1				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggran Perda/Perkada	4	Rp90.926.400	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala seksi Penegakan Perundangan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2, serta dilanjutkan pada TW 3 dan TW 4	1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target penyelesaian laporan tercapai hingga Triwulan II.2. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap pada Triwulan III dan IV sesuai rencana kerja.3. Mempercepat proses penanganan pelanggaran sesuai SOP agar tidak terjadi penumpukan kasus.4. Meningkatkan koordinasi antarpetugas penegakan untuk memperlancar pelaksanaan di lapangan.Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil penanganan pelanggaran.
2				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelanggaran Perda/Perkada	12	Rp82.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	8,33%	Rp4.750.000	5,79%	3	25,00%	Rp12.100.000	14,76%	Kepala seksi Penegakan Perundangan			
11				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	%	Jumlah PPNS terbina dibagi jumlah target PPNS terbina dikali 100%	100	Rp7.300.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala seksi Penegakan Perundangan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2, serta dilanjutkan pada TW 3 dan TW 4	1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target penyelesaian laporan tercapai hingga Triwulan II.2. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap pada Triwulan III dan IV sesuai rencana kerja.3. Mempercepat proses penanganan pelanggaran sesuai SOP agar tidak terjadi penumpukan kasus.4. Meningkatkan koordinasi antarpetugas penegakan untuk memperlancar pelaksanaan di lapangan.5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil penanganan pelanggaran.
1				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kapasitas PPNS	1	Rp7.300.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala seksi Penegakan Perundangan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2, serta dilanjutkan pada TW 3 dan TW 4	1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS agar dapat diselesaikan sesuai target pada Triwulan II.2. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap pada Triwulan III dan IV.3. Mempercepat proses administrasi dan koordinasi dengan instansi

																								pembina PPNS. 4. Menyiapkan materi pelatihan dan kebutuhan pendukung sejak awal untuk memperlancar pelaksanaan. 5. Melakukan evaluasi hasil pelatihan guna memastikan peningkatan kompetensi PPNS sesuai tujuan.	
C	Meningkatkan kualitas penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran yang dipenuhi dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang harus dipenuhi dikali 100%	100	Rp2.570.756.607	30,23	30,23%	Rp163.971.240	6,38%	40,76	40,76%	Rp433.930.530	16,88%	52,59	52,59%	Rp613.321.770	23,86%	Kepala SatpolPP	Jumlah warganegara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan kebakaran sebanyak 61 Orang dengan target Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Diperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berjumlah 116 Orang	Memaksimalkan target capaian kinerja di TW 2, TW 3 dan TW 4	1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II, III, dan IV untuk mencapai target 100%. 2. Meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan dalam merespons kejadian kebakaran. 3. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mempercepat proses penyelamatan. 4. Melakukan evaluasi dan pelaporan rutin atas setiap kegiatan penyelamatan untuk memantau progres capaian.
3		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan + Persentase Capaian Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	100	Rp2.570.756.607	10	10,00%	Rp163.971.240	6,38%	20	20,00%	Rp433.930.530	16,88%	30	30,00%	Rp613.321.770	23,86%	Kepala SatpolPP	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berjumlah 158 kejadian (Kebakaran dan Non Kebakaran)	-	
III			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Jangkauan luas WMK dibagi luas wilayah kota dikali 100%	100	Rp2.570.756.607	12,32	12,32%	Rp163.971.240	6,38%	12,32	12,32%	Rp433.930.530	16,88%	12,32	12,32%	Rp613.321.770	23,86%	Kepala Bid Damkar			
12				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	100	Rp602.432.440	15,83	15,83%	Rp11.700.000	1,94%	21,50	21,50%	Rp129.388.050	21,48%	29,41	29,41%	Rp153.398.050	25,46%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat waktu tanggap respon time tidak terpenuhi karena jumlah kebakaran yang terdata pada TW	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kebakaran sesuai waktu tanggap respon time	1. Mengoptimalkan kecepatan respon petugas dalam menangani laporan kebakaran agar sesuai standar waktu 15 menit.2. Menempatkan armada dan personel di titik strategis untuk

																					1 berjumlah 17 kejadian dengan waktu 266 menit sedangkan jumlah yang terlayani secara respointi me berjumlah 5 kejadian dengan waktu 58 menit. Jika dirata ratakan dari 17 kejadian tersebut didapat nilai rata-rata respointi me 18,17 menit (melebihi batas waktu minimal 15 menit)		mempercepat waktu keberangkatan ke lokasi kejadian.3. Memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait untuk mempercepat informasi awal kebakaran.4. Melakukan pengecekan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung agar selalu siap digunakan.5. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kesiapsiagaan dan simulasi tanggap darurat bagi petugas.	
1				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Jumlah Dokumen NSPM/SOP/Kajian dan Pelaksanaanya	1	Rp1.825.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar penyusunan dokumen NSPM/SOP selesai sesuai target pada Triwulan II. 2. Mempercepat proses pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung penyusunan dokumen 3. Melakukan verifikasi dan finalisasi dokumen secara tepat waktu. 4. Menyusun laporan hasil kegiatan setelah dokumen NSPM selesai disusun.
2				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kejadian dan Penyelamatan Kasus kebakaran dan Non Kebakaran	1	Rp117.600.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	100,00%	Rp28.080.000	23,88%	1	100,00%	Rp28.080.000	23,88%	Kepala Seksi Pemadam an dan Penyelamatan		
3				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Jumlah Dokumen Satandarisasi Sarana dan Prasarana Damkar	1	Rp422.805.640	1	100,00%	Rp11.700.000	2,77%	1	100,00%	Rp101.308.050	23,96%	1	100,00%	Rp125.318.050	29,64%	Kepala Seksi Pencegahan		

4				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Jumlah Petugas Damkar yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan/ Standard	70	Rp13.500.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sertifikasi aparatur Damkar sesuai jadwal pada Triwulan IV. 2. Menyiapkan peserta, materi, dan kebutuhan pelatihan sejak awal agar pelaksanaan berjalan lancar. 3. Berkoordinasi dengan lembaga pelatihan dan instansi pembina Damkar untuk memastikan sertifikasi sesuai standar. 4. Menyusun laporan hasil pembinaan dan sertifikasi setelah kegiatan selesai.
5				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi SKIK	67	Rp1.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pada Triwulan II. 2. Menyiapkan perangkat, data, dan kebutuhan teknis pengelolaan SKIK sejak awal agar pelaksanaan tepat waktu. 3. Berkoordinasi dengan kelurahan terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas dan jaringan informasi. 4. Melakukan pembaruan dan pemutakhiran data SKIK secara berkala setelah sistem berjalan.
6				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/Standard	19	Rp43.051.800	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai jadwal pada Triwulan II. 2. Menyusun dan menyiapkan dokumen pendukung pengadaan (RAB, spesifikasi teknis, dan HPS) sejak awal agar proses berjalan lancar. 3. Berkoordinasi dengan bagian pengadaan barang/jasa untuk memastikan kelancaran proses administrasi. 4. Memastikan seluruh sarana dan prasarana yang diadakan sesuai standar teknis dan kebutuhan operasional.
7				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerjasama pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran yang tersedia	1	Rp2.650.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2	1. Menyelesaikan proses penyusunan dan finalisasi dokumen kerja sama pada Triwulan II. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (antar daerah, lembaga, dan mitra) untuk percepatan penyusunan kesepakatan kerja sama. 3. Menetapkan jadwal pertemuan dan pembahasan

																								teknis agar pelaksanaan tepat waktu. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kemajuan penyusunan dokumen kerja sama.	
13				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan proteksi kebakaran	%	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran dibagi jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran dikali 100%	100	Rp27.307.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Sebagain besar masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2	1. Menyelesaikan proses pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada Triwulan II.2. Menetapkan jadwal inspeksi secara terukur pada seluruh bangunan/gedung yang menjadi sasaran.3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemilik/pengelola gedung untuk mempercepat proses pemeriksaan.4. Melakukan pencatatan hasil inspeksi secara sistematis sebagai dasar penilaian kelayakan proteksi kebakaran.
1				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan bangunan/Gedung/Lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran	20	Rp11.152.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2	1. Menyelesaikan proses pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada Triwulan II. 2. Menetapkan jadwal pendataan yang terukur pada seluruh bangunan/gedung/lingkungan sasaran. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemilik bangunan untuk memperoleh data akurat. 4. Menyusun dan memfinalisasi dokumen hasil pendataan sesuai dengan format dan standar yang berlaku.
2				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan standard proteksi kebakaran	15	Rp16.155.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 3	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan kegiatan penilaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Triwulan III. 2. Mempersiapkan instrumen dan tim teknis penilaian sejak awal untuk memastikan kelancaran kegiatan. 3. Melakukan koordinasi dengan pemilik/pengelola bangunan yang menjadi objek penilaian agar kegiatan berjalan tepat waktu. 4. Menyusun dan memvalidasi dokumen hasil penilaian sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
14				Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi terhadap kejadian kebakaran	%	Jumlah kejadian kebakaran yang dilakukan terinvestigasi lanjutan dibagi	100	Rp1.100.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pemadam dan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	1. Melakukan investigasi terhadap setiap kejadian kebakaran yang

							jumlah kejadian kebakaran dikali 100%													Penyela matan		yang telah ditentukan	terjadi sesuai prosedur dan ketentuan. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan investigasi pada Triwulan II agar seluruh kejadian dapat ditangani tepat waktu. 3. Mengumpulkan data dan bukti pendukung di lokasi kejadian untuk keperluan analisis penyebab kebakaran. 4. Menyusun laporan hasil investigasi sebagai dasar evaluasi pencegahan kebakaran berikutnya. 5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses investigasi dan pelaporan.		
1				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian danPenguian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Penguian dan Penelitian	Dokumen	Jumlah Dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran	2	Rp1.100.00 0	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pemadam an dan Penyelam atan	Jadwal pelaksana an kegiatan di TW 2	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan koordinasi dengan tim pemadam dan penyelidikan untuk pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kebakaran sesuai rencana di Triwulan II. 3. Mengumpulkan data dan bukti lapangan dari lokasi kejadian kebakaran sebagai bahan penyusunan dokumen investigasi. 4. Menyusun dan melaporkan hasil investigasi dalam bentuk dokumen resmi sesuai ketentuan. 5. Melakukan evaluasi hasil investigasi untuk perbaikan upaya pencegahan kebakaran di masa mendatang.
1 5				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyakat dalam Lingkup Sitem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	%	Jumlah SKKL yang sudah dilakukan pemberdayaan yang dibentuk dan atau dibawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PD dibagi Jumlah SKKL dikali 100%	100	Rp1.939.91 7.067	11,09	11,09%	Rp152.27 1.240	7,85%	15,08	15,08%	Rp304.542. 480	15,70%	19,87	19,87%	Rp459.923. 720	23,71%	Kepala Seksi Pemada man dan Penyela matan			
1				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranSetiap Tahunnya	Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan pemadam kebakaran lingkup SKKL	120	Rp1.908.70 7.467	10	8,33%	Rp152.27 1.240	7,98%	20	16,67%	Rp304.542. 480	15,96%	30	25,00%	Rp459.923. 720	24,10%	Kepala Seksi Pemadam an dan Penyelam atan			
2				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkunga	Desa/Kelu rahan	Jumlah SKKL lingkup Kelurahan yang sudah terbentuk dan Terbina Relawan Kebakaran	30	Rp27.687.6 00	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pemadam an dan Penyelam atan	Jadwal pelaksana an kegiatan di TW 2	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksananakan koordinasi dengan camat dan lurah untuk menentukan lokasi pembentukan relawan. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan dan panduan

					n (SKKL) Setiap Tahunnya																			pembinaan relawan pemadam kebakaran. 3. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan di 30 kelurahan sesuai jadwal TW II. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan relawan pada akhir kegiatan.	
3				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan PemadamKebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	Jumlah Dokumen yang memuat SKKL lingkup Kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras Damkar	1	Rp3.522.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pemadam an dan Penyelam atan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaa n kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan koordinasi lintas bidang dengan kelurahan dan kecamatan untuk pemutakhiran data sarana dan prasarana damkar. 2. Menyusun dokumen SKKL sesuai format dan ketentuan teknis. 3. Menjadwalkan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 agar capaian indikator meningkat.
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Urusan						%		19,6508			0,00%		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Urusan						%		100			0,00%		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!				
Jumlah dan Rata-rata Capaian Kinerja Program pada Urusan						%		95,00			0,00%		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!		0,00%		#DIV/0!				
Predikat Kinerja																									

Serang, 15 April 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG

Drs HERI HADI
Pembina Utama Muda. IV c
NIP. 19700518.199006.1.001

LAPORAN EVALUASI KINERJA SATPOLPP KOTA SERANG TAHUN 2025 TRIWULAN II

N O	TUJUAN STRATE GIS	SASAR AN STRATE GIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	TARGET		TRIWULAN II												UNIT PENANGGUN GJAWAB	PERMASA LAHAN	SOLUSI			
										APRIL				MEI				JUNI									
										KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN							
								K	(Rp)	REALI SASI (K)	CAPAI AN (%)	REALISA SI (K)	CAPAIA N (%)	REALI SASI (K)	CAPAI AN (%)	REALISA SI (K)	CAPAIA N (%)	REALI SASI (K)	CAPAI AN (%)	REALISA SI (K)	CAPAIA N (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/9 *100	13	14=13/1 0*100	15	16=15/9 *100	17	18=17/1 0*100	19	20=19/9 *100	21	22=21/1 0*100	23	24	25	25	25	
			Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat				%		91,9 6	Rp17.304.5 12.954	41,71	45,36%	Rp4.598.1 64.802	26,57%	49,12	53,41%	Rp5.153.4 63.745	29,78%	64,25	69,87%	Rp7.093.3 53.946	40,99%	Kepala SatpolPP				
A	Meningk atnya Akuntabi litas Kinerja SatpolP P				Nilai Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Poin	Nilai Hasil Penilaian SAKIP Satpol PP (0-100)	75,8 9	Rp9.364.67 1.814	77,60	102,25 %	Rp2.178.8 38.032	23,27%	77,60	102,25 %	Rp2.640.3 21.335	28,19%	77,60	102,25 %	Rp3.444.4 70.148	36,78%	Kepala SatpolPP	Nilai hasil untuk evaluasi AKIP Satpol PP Tahun 2025 belum di evaluasi	Menggun akan nilai evaluasi AKIP Satpol PP Tahun 2024 sebagai data sementar a	Menggun akan nilai evaluasi AKIP Satpol PP Tahun 2024 sebagai data sementar a	Mengguna kan nilai evaluasi AKIP Satpol PP Tahun 2024 sebagai data sementara	
1		Meningk atnya Capaian Kinerja Utama SatpolP P			Rata - Rata Tingkat Capaian IKU SatpolPP	Nilai	Nilai Hasil Capaian IKU Satpol PP (0- 100)	95,4 8	Rp9.364.67 1.814	63,40	66,40%	Rp2.178.8 38.032	23,27%	63,40	66,40%	Rp2.640.3 21.335	28,19%	63,40	66,40%	Rp3.444.4 70.148	36,78%	Kepala SatpolPP					
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KEBUPATEN/ KOTA		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Poin	Skor hasil survai	85	Rp9.364.67 1.814	70,40	82,82%	Rp2.178.8 38.032	23,27%	70,40	82,82%	Rp2.640.3 21.335	28,19%	70,40	82,82%	Rp3.444.4 70.148	36,78%	Sekretaris					

1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD dibagi Target ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dikali 100%	100	Rp271.988.600	35,29	35,29%	Rp55.048.560	20,24%	35,29	35,29%	Rp55.048.560	20,24%	41,18	41,18%	Rp75.738.560	27,85%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD (Renstra, Renja beserta perubahannya, IKU dan PK	5	Rp120.494.300	3	60,00%	Rp17.600.800	14,61%	3	60,00%	Rp17.600.800	14,61%	3	60,00%	Rp33.080.800	27,45%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Rp9.489.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan persiapan penyusunan dokumen RKA-SKPD sejak awal Triwulan IV agar pelaksanaan sesuai jadwal. 2. Mengumpulkan data pendukung dan kebutuhan anggaran dari masing-masing bidang secara tepat waktu. 3. Melaksanakan koordinasi internal secara intensif untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan. 4. Melakukan pemantauan progres penyusunan dokumen agar target capaian dan waktu pelaksanaan dapat tercapai sesuai rencana.

3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp7.536.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaa n kegiatan di TW 3	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan percepatan pengumpulana data dan usulan perubahan dari setiap bidang untuk mendukung penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD. 2. Menyusun draft perubahan RKA-SKPD lebih awal agar proses koordinasi dapat dilakukan tepat waktu. 3. Melaksanak an koordinasi intensif dengan pihak terkait guna memastikan kesesuaian perubahan anggaran dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan pemantau n dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaa n kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Rp4.711.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaa n kegiatan di TW 4	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan persiapan awal berupa pengumpulana data dan dokumen pendukung penyusunan DPA-SKPD sebelum Triwulan IV. 2. Menjalin koordinasi rutin dengan bidang terkait untuk memastikan kelengkapana dan kesesuaian data. 3. Menyusun draft DPA-SKPD lebih awal agar proses finalisasi dapat berjalan lancar sesuai jadwal. 4.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja (Evlap Renja, LKJIP dan lainnya) laporan koordinasi capaian kinerja	7	Rp77.046.500	3	42,86%	Rp37.447.760	48,60%	3	42,86%	Rp37.447.760	48,60%	4	57,14%	Rp42.657.760	55,37%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Laporan	Jumlah dokumen profil PD	1	Rp48.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan persiapan penyusunan dokumen evaluasi kinerja sejak awal Triwulan IV. 2. Mengumpulkan data kinerja perangkat daerah secara lengkap dan akurat dari seluruh bidang terkait. 3. Menyusun draft laporan evaluasi kinerja sesuai format dan ketentuan yang berlaku. 4. Melaksanak an rapat koordinasi dan verifikasi internal untuk memastikan kualitas serta ketepatan waktu penyusunan laporan.
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dibagi Target ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dikali 100%	100	Rp7.576.447.811	8,33	8,33%	Rp1.729.319.281	22,82%	16,66	16,66%	Rp2.077.676.355	27,42%	41,11	41,11%	Rp2.799.427.277	36,95%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				

1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah ASN yang termuat dalam dokumen penerimaan gaji dan TPP setiap bulannya	1020	Rp7.488.453.111	340	33,33%	Rp1.703.359.381	22,75%	425	41,67%	Rp2.046.856.455	27,33%	510	50,00%	Rp2.758.410.177	36,84%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi	1	Rp9.994.700	0	0,00%	Rp6.079.900	60,83%	0	0,00%	Rp6.079.900	60,83%	1	100,00%	Rp9.937.100	99,42%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan laporan koordinasi	4	Rp78.000.000	1	25,00%	Rp19.880.000	25,49%	2	50,00%	Rp24.740.000	31,72%	3	75,00%	Rp31.080.000	39,85%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dibagi target ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dikali 100%	100	Rp46.816.000	0,00	0,00%	Rp14.722.000	31,45%	42,86	42,86%	Rp16.459.800	35,16%	57,14	57,14%	Rp25.181.800	53,79%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	2	Rp4.444.000	0	0,00%	Rp2.222.000	50,00%	1	50,00%	Rp2.222.000	50,00%	1	50,00%	Rp4.444.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			

2				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	jumlah laporan terkait penatausahaan barang milik daerah	5	Rp42.372.000	0	0,00%	Rp12.500.000	29,50%	2	40,00%	Rp14.237.800	33,60%	3	60,00%	Rp20.737.800	48,94%	Kepala Sub Bag Umpeg				
4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian PD dibagi target ketersediaan penunjang administrasi PD dikali 100%	100	Rp18.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaa n kegiatan di TW 4	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentuka n	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentuka n	1. Melakukan inventarisa si kebutuhan penunjang administra si kepegawai an sebelum pelaksanaa n di Triwulan IV. 2. Menyiapka n dokumen administra si dan data pegawai yang diperlukan untuk mendukun g pelaksanaa n kegiatan. 3. Melaksana kan koordinasi dengan pihak terkait guna memastika n ketersediaa n barang/jas a penunjang administra si tepat waktu. 4. Melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaa n agar kegiatan selesai sesuai jadwal dan target capaian terpenuhi.

				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12	Rp18.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaa n kegiatan di TW 4	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Menyusun rencana kebutuhan pakaian dinas dan atribut secara rinci sesuai jumlah pegawai. 2. Melakukan proses administrasi pengadaan (RUP, HPS, dan dokumen pendukung) lebih awal sebelum pelaksanaa n Triwulan IV. 3. Berkoordinasi dengan penyedia untuk memastikan ketersediaa n bahan dan waktu produksi sesuai jadwal. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi selama proses pengadaan agar kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi.
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg				
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi umum perangkat daerah	%	Reakisasi ketersediaan penunjang administrasi umum PD dibagi Target ketersediaan penunjang administrasi umum PD dikali 100%	100	Rp426.702.332	38,24	38,24%	Rp142.562.348	33,41%	44,12	44,12%	Rp176.799.508	41,43%	52,94	52,94%	Rp196.379.308	46,02%	Kepala Sub Bag Umpeg				

1				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2	Rp63.610.732	1	50,00%	Rp38.731.148	46,32%	1	50,00%	Rp41.577.808	49,73%	1	50,00%	Rp41.577.808	49,73%	Kepala Sub Bag Umpeg				
2				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	Rp2.389.300	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor	1	Rp45.578.800	1	100,00%	Rp15.683.600	34,41%	1	100,00%	Rp18.627.600	40,87%	1	100,00%	Rp22.007.400	48,28%	Kepala Sub Bag Umpeg				
4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	Rp47.857.300	1	100,00%	Rp11.888.300	24,84%	1	100,00%	Rp21.062.800	44,01%	1	100,00%	Rp21.062.800	44,01%	Kepala Sub Bag Umpeg				
5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Rp56.167.200	0	0,00%	Rp14.460.000	25,74%	0	0,00%	Rp17.480.000	31,12%	1	50,00%	Rp23.480.000	41,80%	Kepala Sub Bag Umpeg				
6				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Rp30.000.000	4	33,33%	Rp10.000.000	33,33%	5	41,67%	Rp12.500.000	41,67%	6	50,00%	Rp15.000.000	50,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Rp110.339.000	4	33,33%	Rp34.010.000	30,82%	5	41,67%	Rp47.762.000	43,29%	6	50,00%	Rp47.762.000	43,29%	Kepala Sub Bag Umpeg				

8				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doumen	jumlah dokumen pelaksanaan SPBE	3	Rp50.760.000	1	33,33%	Rp15.400.000	30,34%	1	33,33%	Rp15.400.000	30,34%	1	33,33%	Rp23.100.000	45,51%	Kepala Sub Bag Umpeg				
6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan hasil pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Realisasi ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100%	100	Rp129.154.800	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2 dan TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan percepatan proses administrasi pengadaan untuk Triwulan IV agar pelaksanaan tidak tertunda. 2. Menyusun jadwal kerja rinci antara bagian perencanaan, keuangan, dan penyedia barang agar koordinasi lebih efektif. 3. Melakukan verifikasi ulang terhadap spesifikasi teknis barang untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perangkat daerah. 4. Melaksanakan monitoring progres pengadaan secara berkala untuk menjamin kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan.
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	jumlah unit kendaraan dinas jabatan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg				

1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas lapangan	1	Rp42.754.700	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan percepatan proses administrasi pengadaan seperti penyusunan dokumen RUP, HPS, dan persiapan lelang/penunjukan langsung. 2. Menjalinkan koordinasi intensif dengan bagian keuangan dan penyedia untuk memastikan ketersediaan anggaran serta keesuaian spesifikasi kendaraan. 3. Menetapkan jadwal pelaksanaan yang lebih rinci agar pengadaan dapat selesai tepat waktu pada Triwulan IV. 4. Melakukan monitoring berkala terhadap setiap tahapan proses pengadaan guna menghindari keterlambatan realisasi.
2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	Jumlah unit sarana prasarana gedung kantor	6	Rp86.400.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan percepatan proses administrasi pengadaan sesuai jadwal Triwulan II, termasuk penyusunan dokumen RUP, HPS, dan persiapan kontrak. 2. Berkoordinasi dengan penyedia barang untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. 3. Melaksanakankan pengadaan secara tepat waktu agar tidak mengganggu

																										u kegiatan operasional kantor. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan guna menjamin mutu dan ketepatan realisasi sesuai rencana.
7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Realisasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	100	Rp133.700.000	40,00	40,00%	Rp34.911.893	26,11%	46,67	46,67%	Rp42.166.662	31,54%	53,33	53,33%	Rp49.637.753	37,13%	Kepala Sub Bag Umpeg				
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Rp8.100.000	1	100,00 %	Rp4.100.000	50,62%	1	100,00 %	Rp4.100.000	50,62%	1	100,00 %	Rp4.100.000	50,62%	Kepala Sub Bag Umpeg				
2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp96.000.000	4	33,33%	Rp27.011.893	28,14%	5	41,67%	Rp34.066.662	35,49%	6	50,00%	Rp41.337.753	43,06%	Kepala Sub Bag Umpeg				

3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	Rp29.600.000	1	50,00%	Rp3.800.000	12,84%	1	50,00%	Rp4.000.000	13,51%	1	50,00%	Rp4.200.000	14,19%	Kepala Sub Bag Umpeg				
8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	Realisasi ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dibagi target ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dikali 100%	100	Rp761.862.271	38,60	38,60%	Rp202.273.950	26,55%	43,86	43,86%	Rp272.170.450	35,72%	50,88	50,88%	Rp298.105.450	39,13%	Kepala Sub Bag Umpeg				
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	Rp219.628.075	2	40,00%	Rp79.498.075	36,20%	2	40,00%	Rp110.907.575	50,50%	2	40,00%	Rp118.832.575	54,11%	Kepala Sub Bag Umpeg				
2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14	Rp295.394.196	5	35,71%	Rp116.065.875	39,29%	6	42,86%	Rp154.552.875	52,32%	7	50,00%	Rp165.852.875	56,15%	Kepala Sub Bag Umpeg				
3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit peliharaan dan mesin lainnya yg dipelihara	37	Rp26.840.000	15	40,54%	Rp6.710.000	25,00%	17	45,95%	Rp6.710.000	25,00%	20	54,05%	Rp13.420.000	50,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				

4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah unit bangunan dan gedung yang dipelihara	1	Rp220.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2 dan TW 3	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan percepatan proses administrasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sesuai jadwal Triwulan II dan III. 2. Menyusun rencana kerja rinci dan jadwal pelaksanaan lapangan agar kegiatan dapat dimulai tepat waktu. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana untuk memastikan kesiapan tenaga, material, dan peralatan. 4. Melaksanak an monitoring secara berkala untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar dan target waktu yang telah ditetapkan.
B	Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum				Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	100	Rp5.417.475.200	20	20,00%	Rp1.596.103.760	29,46%	40	40,00%	Rp1.646.388.160	30,39%	60	60,00%	Rp2.448.198.308	45,19%	Kepala SatpolPP	Jumlah pengaduan yang diselesaikan (Jan-Mar) berjumlah 3 laporan sedangkan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk berjumlah 5 laporan	Pengaduan yang masih dalam proses tahapan pelaksanaan yaitu penertiban Pasar Rau dan Stadion	Pengaduan yang masih dalam proses tahapan pelaksanaan yaitu penertiban Pasar Rau dan Stadion	

2		Menurun nya pelangg aran Perda dan Perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	Jumlah perda atau perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100	Rp5.417.47 5.200	20	20,00%	Rp1.596.1 03.760	29,46%	50,00	50,00%	Rp1.646.3 88.160	30,39%	61,54	61,54%	Rp2.448.1 98.308	45,19%	Kepala SatpolPP	Target untuk penegakan di Tahun 2025 berjumlah 13 Perda/Perk ada dan yang sudah di tegakan berjumlah 8 Perda/Perk ada	Mengopti malkan penegaka n Perda/Per kada	Mengopti malkan penegaka n Perda/Per kada	
II			PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam kab/kota yang ditangani	%	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang masuk dikali 100%	100	Rp5.417.47 5.200	39,78	39,78%	Rp1.596.1 03.760	29,46%	43,99	43,99%	Rp1.646.3 88.160	30,39%	60,64	60,64%	Rp2.448.1 98.308	45,19%	Kepala PPPU dan Trantib				
9				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	Pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SatpolIPP dikali 100%	100	Rp5.237.24 8.800	34,12	34,12%	Rp1.576.4 28.760	30,10%	44,71	44,71%	Rp1.617.5 63.160	30,89%	48,24	48,24%	Rp2.406.0 23.308	45,94%	Kepala Seksi Dalop				

					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		%	Jumlah petugas Linmas di Daerah yang tersedia dibagi 1 wilayah kerja Kota (55 Linmas x 67 Kelurahan) dikali 100%	100	0	0,00%		#DIV/0!	0	0,00%		#DIV/0!	56,83	56,83%		#DIV/0!	Kepala Seksi Linmas				
1			224	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp9.006.00 0	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp4.056.0 00	45,04%	0	0,00%	Rp4.056.0 00	45,04%	Kepala Seksi Linmas				
2				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp39.451.0 00	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp32.028. 000	81,18%	Kepala Seksi Linmas				

3				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Jumlah Petugas Satpol PP dan Linmas yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai Standard	139	Rp144.085.800	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	79	56,83%	Rp6.950.000	4,82%	Kepala Seksi SDA				
4				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang tersedia	3	Rp4.696.561.400	1	33,33%	Rp1.478.328.760	31,48%	1	33,33%	Rp1.481.288.760	31,54%	1	33,33%	Rp2.201.620.908	46,88%	Kepala Seksi Dalop				
5				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan KetenteramanMasya rakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteramandan Ketertiban Umum yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dibuat dan Dimutakhirkan	1	Rp1.825.000	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Dalop				

6				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	17	Rp109.768.600	7	41,18%	Rp58.200.000	53,02%	8	47,06%	Rp58.468.400	53,27%	9	52,94%	Rp58.468.400	53,27%	Kepala Seksi Dalop				
7				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	50	Rp214.000.000	20	40,00%	Rp38.300.000	17,90%	25	50,00%	Rp72.150.000	33,71%	30	60,00%	Rp101.300.000	47,34%	Kepala Seksi Dalop				
8				Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Jumlah laporan layanan yang terkena dampak gangguanTrantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaranPerda dan Perkada yang tersedia	1	Rp20.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Dalop	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4, akan tetapi atas dasar klaim dari masyarakat yang mendapatkan kerugian materil maupun pengobatan akibat penegakan perda dan perkada	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan verifikasi dan pendataan klaim masyarakat yang mengalami kerugian materil maupun non-materil akibat penegakan Perda dan Perkada.2. Menyiapkan dokumen administrasi dan kelengkapan pendukung agar proses penyediaan layanan dasar dapat dilaksanakan tepat waktu pada Trivulan IV.3. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketepatan sasaran

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perkada	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dibagi jumlah pelanggaran PERDA/PERKADA dikali 100%	100	Rp172.926.400	25,00	25,00%	Rp18.100.000	10,47%	31,25	31,25%	Rp27.250.000	15,76%	37,50	37,50%	Rp40.600.000	23,48%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
1				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggran Perda/Perkada	4	Rp90.926.400	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2, serta dilanjutkan pada TW 3 dan TW 4	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW 2, serta dilanjutkan pada TW 3 dan TW 4	1. Mempercepat koordinasi lintas bidang untuk memastikan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada dapat segera dilaksanakan sesuai SOP. 2. Menyusun jadwal operasional penegakan secara lebih rinci agar pelaksanaan dapat dimulai sejak Triwulan II dan berlanjut hingga Triwulan IV. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya personel dan logistik untuk mendukung efektivitas kegiatan

																										penangan n pelanggara n.= 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan progres kegiatan sesuai dengan target waktu dan output yang direncanaka n.
2				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelanggaran Perda/Perkada	12	Rp82.000.0 00	4	33,33%	Rp18.100. 000	22,07%	5	41,67%	Rp27.250. 000	33,23%	6	50,00%	Rp40.600. 000	49,51%	Kepala seksi Penegakan Perundang- Undangan				
1 1				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	%	Jumlah PPNS terbina dibagi jumlah target PPNS terbina dikali 100%	100	Rp7.300.00 0	100	100,00 %	Rp1.575.0 00	21,58%	100	100,00 %	Rp1.575.0 00	21,58%	100	100,00 %	Rp1.575.0 00	21,58%	Kepala seksi Penegakan Perundang- Undangan				

1				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PPNS	1	Rp7.300.000	1	100,00 %	Rp1.575.000	21,58%	1	100,00 %	Rp1.575.000	21,58%	1	100,00 %	Rp1.575.000	21,58%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
C	Meningkatkan kualitas penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran yang dipenuhi dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang harus dipenuhi dikali 100%	100	Rp2.522.365.940	30,23	30,23%	Rp823.223.010	32,64%	40,76	40,76%	Rp866.754.250	34,36%	52,59	52,59%	Rp1.200.685.490	47,60%	Kepala SatpolPP	Jumlah warganegara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan kebakaran sebanyak 61 Orang dengan target Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berjumlah 116 Orang	Memaksikan target capaian kinerja di TW 2, TW 3 dan TW 4	Memaksikan target capaian kinerja di TW 2, TW 3 dan TW 4	

3		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan + Persentase Capaian Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	100	Rp2.522.365.940	10	10,00%	Rp823.223.010	32,64%	20	20,00%	Rp866.754.250	34,36%	30	30,00%	Rp1.200.685.490	47,60%	Kepala SatpolPP	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berjumlah 158 kejadian (Kebakaran dan Non Kebakaran)	-	-	
III			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Jangkauan luas WMK dibagi luas wilayah kota dikali 100%	100	Rp2.522.365.940	14,95	14,95%	Rp823.223.010	32,64%	32,98	32,98%	Rp866.754.250	34,36%	61,71	61,71%	Rp1.200.685.490	47,60%	Kepala Bid Damkar				
1 2				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	100	Rp602.432.440	33,32	33,32%	Rp211.128.050	35,05%	41,65	41,65%	Rp229.178.050	38,04%	49,98	49,98%	Rp270.128.050	44,84%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
1				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Jumlah Dokumen NSPM/SOP/Kajian dan Pelaksanaanya	1	Rp1.825.000	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Pencegahan				

2				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kejadian dan Penyelamatan Kasus kebakaran dan Non Kebakaran	1	Rp117.600.000	1	100,00 %	Rp49.580.000	42,16%	1	100,00 %	Rp57.080.000	48,54%	1	100,00 %	Rp57.080.000	48,54%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
3				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Jumlah Dokumen Satandarisasi Sarana dan Prasarana Damkar	1	Rp422.805.640	1	100,00 %	Rp159.948.050	37,83%	1	100,00 %	Rp170.498.050	40,33%	1	100,00 %	Rp208.798.050	49,38%	Kepala Seksi Pencegahan				
4				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Jumlah Petugas Damkar yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan/Standard	70	Rp13.500.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 4	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melakukan koordinasi awal dengan lembaga pelatihan bersertifikat untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV. 2. Menyusun daftar nominatif aparatur pemadam kebakaran yang akan mengikuti pelatihan agar proses administrasi dan teknis berjalan tepat waktu. 3. Menyiapkan seluruh

																									dokumen pendukung kegiatan, termasuk kebutuhan anggaran dan sarana pelatihan, sebelum jadwal pelaksanaaa n. 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaaa n pembinaan aparaturnya berlangsung sesuai jadwal dan menghasilkan aparaturnya yang kompeten serta tersertifikasi	
5				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi SKIK	67	Rp1.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaaa n kegiatan di TW 2	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksana an kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Memastikan seluruh kelurahan yang menjadi target difasilitasi dengan perangkat SKIK yang memadai sebelum Triwulan II. 2. Menyusun jadwal instalasi dan uji coba sistem komunikasi serta informasi kebakaran secara bertahap untuk menjamin kelayakan dan real-time operasional. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan untuk pendampingan penggunaa n SKIK agar dapat diperbarui dan dimutakhirkan secara berkala. 4. Menyiapkan dokumentasi teknis dan administrasi kegiatan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi

7				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar DaerahBerbatasan, antar Lembaga, dan Kamitran dalam Pencegahan, Penan ggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan PenyelamatanNon Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerjasama pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran yang tersedia	1	Rp2.650.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp2.650.000	100,00%	Kepala Seksi Pencegahan				
13				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Bangunan/Gedung/ Li ngkungan yang memenuhi kelaiaian proteksi kebakaran	%	Jumlah bangunan/gedung/ lingkungan yang memenuhi kelaiaian standar dibagi jumlah bangunan/gedung/ lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran dikali 100%	100	Rp22.682.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	57,14	57,14%	Rp10.900.000	48,06%	57,14	57,14%	Rp10.900.000	48,06%	Kepala Seksi Pencegahan				

1				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan bangunan/Gedung/Lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran	20	Rp11.152.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	20	100,00%	Rp10.900.000	97,74%	20	100,00%	Rp10.900.000	97,74%	Kepala Seksi Pencegahan				
2				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan standard proteksi kebakaran	15	Rp11.530.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 3	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Melaksanakan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran sesuai jadwal pada Triwulan III. 2. Menyusun tim penilai dan menetapkan metode evaluasi yang sesuai standar proteksi kebakaran. 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di setiap bangunan/gedung untuk memastikan akses dan data lengkap. 4. Menyiapkan dokumentasi hasil penilaian secara sistematis agar memudahkan pelaporan dan tindak lanjut perbaikan atau pemenuhan standar.
14				Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi terhadap kejadian kebakaran	%	Jumlah kejadian kebakaran yang dilakukan terinvestigasi lanjutan dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100%	100	Rp1.100.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	100	100,00%	Rp1.100.000	100,00%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				

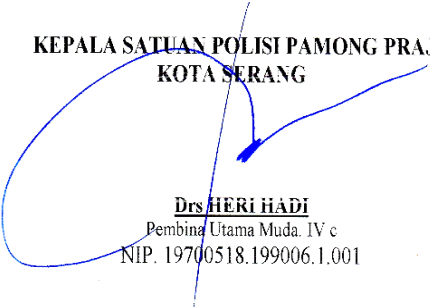
1				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian danPengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	Jumlah Dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran	2	Rp1.100.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	2	100,00%	Rp1.100.000	100,00%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
15				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyakat dalam Lingkup Sitem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	%	Jumlah SKKL yang sudah dilakukan pemberdayaan yang dibentuk dan atau dibawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PD dibagi Jumlah SKKL dikali 100%	100	Rp1.896.151.400	26,49	26,49%	Rp612.094.960	32,28%	33,11	33,11%	Rp626.676.200	33,05%	39,74	39,74%	Rp918.557.440	48,44%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
1				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan pemadam kebakaran lingkup SKKL	120	Rp1.864.941.800	40	33,33%	Rp612.094.960	32,82%	50	41,67%	Rp626.676.200	33,60%	60	50,00%	Rp918.557.440	49,25%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
2				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Jumlah SKKL lingkup Kelurahan yang sudah terbentuk dan Terbina Relawan Kebakaran	30	Rp27.687.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan	Jadwal pelaksanaan kegiatan di TW 2	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan	1. Memulai proses pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran pada Triwulan II sesuai jadwal. 2. Melakukan rekrutmen relawan dengan verifikasi dan seleksi untuk memastikan jumlah dan kualitas relawan sesuai kebutuhan SKKL. 3. Menyelenggarakan pelatihan dasar dan pembinaan teknis untuk relawan yang sudah terpilih. 4. Menyusun dokumentasi dan laporan perkembangan pembentukan relawan untuk memantau pencapaian target jumlah desa/kelurahan

[illegible]

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Urusan	%		34,9 5	Rp 370.433.17 5,06	7,85	22,47%	Rp 101.269.4 60,68	27,34%		10,42	29,81%	Rp 111.250.84 0,40	30,03%		16,96	48,53%	Rp 155.366.6 20,23	41,94%					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Urusan	%		100, 00	Rp 1.234.750.9 25,29	25,29	25,29%	Rp 328.440.3 43,00	26,60%		35,82	35,82%	Rp 368.104.5 53,21	29,81%		52,40	52,40%	Rp 506.668.1 39,00	41,03%					
Jumlah dan Rata-rata Capaian Kinerja Program pada Urusan	%		95,0 0	Rp 5.768.170.9 84,67	41,71	43,91%	Rp 1.532.721. 600,67	26,57%		49,12	51,71%	Rp 1.717.821. 248,33	29,78%		64,25	67,63%	Rp 2.364.451. 315,33	40,99%					
Predikat Kinerja																							

Serang, 3 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG



Drs. **HADI**
Pembina Utama Muda. IV c
NIP. 19700518.199006.1.001

LAPORAN EVALUASI KINERJA SATPOLPP KOTA SERANG TAHUN 2025 TRIWULAN III

N O	TUJUAN STRATE GIS	SASAR AN STRATE GIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	TARGET		TRIWULAN III										UNIT PENANGGUN GJAWAB	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA PERBAIKAN			
										JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER								
										KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA						ANGGARAN		
								K	(Rp)	REALI SASI (K)	CAPAI AN (%)	REALISA SI (Rp)	CAPAIA N (%)	REALI SASI (K)	CAPAI AN (%)	REALISA SI (Rp)	CAPAIA N (%)	REALI SASI (K)	CAPAI AN (%)					REALISASI (Rp)	CAPAIA N (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/9 *100	13	14=13/1 0*100	15	16=15/9 *100	17	18=17/1 0*100	19	20=19/9 *100	21	22=21/1 0*100	23	24	25		
			Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat				%		91,96	Rp17.747.866.654	37,82	41,13%	Rp8.509.307.134	47,95%	48,63	52,88%	Rp9.180.129.797	51,73%	69,42	75,48%	Rp10.767.983.724	60,67%	Kepala SatpolPP			
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolIP				Nilai Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Poin	Nilai Hasil Penilaian SAKIP Satpol PP (0-100)	75,89	Rp9.744.612.414	48,50	63,91%	Rp4.102.157.238	42,10%	50,10	66,02%	Rp4.758.991.257	48,84%	53,93	71,06%	Rp5.426.929.041	55,69%	Kepala SatpolPP				
1		Meningkatnya Capaian Kinerja Utama SatpolIP			Rata - Rata Tingkat Capaian IKU SatpolPP	Nilai	Nilai Hasil Capaian IKU Satpol PP (0-100)	95,48	Rp9.744.612.414	63,40	66,40%	Rp4.102.157.238	42,10%	70,40	73,73%	Rp4.758.991.257	48,84%	70,34	73,67%	Rp5.426.929.041	55,69%	Kepala SatpolPP				
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Poin	Skor hasil survai	85	Rp9.744.612.414	50,10	58,94%	Rp4.102.157.238	42,10%	54,50	64,12%	Rp4.758.991.257	48,84%	61,01	71,78%	Rp5.426.929.041	55,69%	Sekretaris				
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD dibagi Target ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dikali 100%	100	Rp187.502.300	61,20	61,20%	Rp84.752.360	45,20%	62,50	62,50%	Rp151.794.460	80,96%	64,71	64,71%	Rp156.114.460	83,26%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD (Rentra, Renja beserta perubahannya, IKU dan PK	5	Rp9.489.000	3	60,00%	Rp33.080.800	348,62%	3	60,00%	Rp94.253.800	993,30%	4	80,00%	Rp94.253.800	993,30%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Rp7.536.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD baru dapat direalisasikan pada bulan Oktober– November sesuai dengan ketentuan anggaran kas.	Melakukan persiapan penyusunan dokumen lebih awal melalui pengumpulan data, konsultasi, serta penyesuaian kebutuhan sebelum masuk pada bulan realisasi, sehingga saat jadwal realisasi tiba proses dapat berjalan lebih cepat.	1. Melakukan pengumpulan data dan kebutuhan kegiatan secara lebih awal untuk mendukung penyusunan RKA-SKPD. 2. Melaksanakakan koordinasi dan konsultasi internal guna menyelaraskan program dan anggaran antar bidang. 3. Menyusun draft awal RKA-SKPD sebelum masa	

																								realisasi agar proses finalisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. 4. Melakukan monitoring berkala terhadap progres penyusunan untuk memastikan dokumen RKA-SKPD selesai tepat waktu.	
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp4.711.100	0	0,00%	Rp7.493.800	159,07%	0	0,00%	Rp7.493.800	159,07%	1	100,00%	Rp7.493.800	159,07%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Rp4.711.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dapat direalisasikan pada bulan Desember sesuai anggaran kas	Melakukan persiapan pengumpulan data, konsultasi internal, dan penyusunan draft awa serta menjalin komunikasi yang lebih rutin untuk memastikan kesiapan dokumen pendukung sebelum bulan Desember.	1. Melakukan pengumpulana data dan dokumen pendukung sejak awal agar proses penyusunan DPA-SKPD berjalan lancar. 2. Melaksanakankonsultasi internal secara intensif untuk sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang. 3. Menyusun draft awal DPA-SKPD lebih awal untuk mempercepat proses finalisasi. 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi rutin dengan pihak terkait agar penyusunan DPA-SKPD dapat terealisasi tepat waktu pada bulan Desember.
5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp65.054.500	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp4.659.100	7,16%	1	100,00%	Rp4.659.100	7,16%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja (Evlap Renja, LKJIP dan lainnya) laporan koordinasi capaian kinerja	7	Rp48.000.000	3	42,86%	Rp44.177.760	92,04%	3	42,86%	Rp45.387.760	94,56%	5	71,43%	Rp49.707.760	103,56%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan telah menunjukkan hasil	Meningkatkan rapat evaluasi secara periodik agar sub kegiatan tersebut dapat berjalan	1. Meningkatkan rapaintensitasrapat evaluasi secara periodik untuk memastikan

					Realisasi Kinerja SKPD																		yang cukup baik dengan capaian 76,41% dari target Anggaran KAS 77,91%.	secara efektif dan efisien.	penyusunan laporan berjalan efektif dan tepat waktu. 2. Memperkuat koordinasi antar bidang agar data capaian kinerja yang dihimpun lebih akurat dan sinkron. 3. Melakukan pemantauan progres penyusunan laporan secara berkala untuk mengantisipasi keterlambatan. 4. Menyusun jadwal kerja yang lebih terstruktur untuk percepatan penyelesaian laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Laporan	Jumlah dokumen profil PD	1	Rp48.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum terealisasi hingga bulan September dikarenakan sesuai dengan pengaturan anggaran kas, realisasi baru dijadwalkan pada bulan Oktober (Triwulan IV). Kondisi ini menyebabkan capaian realisasi sampai dengan Triwulan III tercatat 0%.	Mempersiapkan penyusunan draft evaluasi	1. Mempersiapkan penyusunan draft laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai jadwal pelaksanaan pada Triwulan IV. 2. Melakukan koordinasi awal dengan perangkat daerah terkait untuk pengumpulan data pendukung evaluasi. 3. Menyusun timeline pelaksanaan dan pembagian tugas agar proses penyusunan berjalan efisien dan tepat waktu. 4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan agar penyusunan laporan dapat selesai sesuai target anggaran kas.
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dibagi Target ketersediaan dokumen administrasi	100	Rp7.564.447.811	65,10	65,10%	Rp3.294.291.305	43,55%	68,50	68,50%	Rp3.803.251.270	50,28%	74,44	74,44%	Rp4.326.156.159	57,19%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			

1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/Bulan	keuangan PD dikali 100% Jumlah ASN yang termuat dalam dokumen penerimaan gaji dan TPP setiap bulannya	85	Rp7.488.453.111	340	400,00 %	Rp3.246.894.205	43,36%	425	500,00 %	Rp3.753.514.170	50,12%	63	74,12%	Rp4.269.519.059	57,01%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	1. Adanya kekosongan jabatan struktural yang belum terisi mengakibatkan sebagian anggaran gaji dan tunjangan tidak dapat terserap, karena pembayaran hanya dapat dilakukan kepada pegawai yang sudah definitif menempati jabatan tersebut. 2. Proses perubahan status kepegawaian dari CPNS menjadi PNS membutuhkan waktu administrasi tertentu sehingga anggaran tidak secara konsisten penyerapannya pada setiap bulannya.	1. Anggaran untuk jabatan struktral yang masih kosong akan tetap disediakan mengingat jabatan tersebut sewaktu-waktu dapat terisi. 2. Anggaran untuk pegawai CPNS menjadi PNS sudah diperhitungkan sejak di awal	1. Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran gaji secara berkala berdasarkan kondisi kepegawaian aktual. 2. Menyusun jadwal monitoring realisasi gaji dan tunjangan setiap bulan untuk memastikan ketepatan alokasi dan serapan anggaran.
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi	1	Rp9.994.700	0	0,00%	Rp9.937.100	99,42%	0	0,00%	Rp9.937.100	99,42%	1	100,00 %	Rp9.937.100	99,42%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP			
3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan laporan koordinasi	4	Rp66.000.000	1	25,00%	Rp37.460.000	56,76%	2	50,00%	Rp39.800.000	60,30%	3	75,00%	Rp46.700.000	70,76%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian 70,76% dari target Anggaran KAS 73,55%.	Meningkatkan rapat evaluasi secara periodik agar sub kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.	1. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dan evaluasi laporan keuangan secara berkala untuk mempercepat penyelesaian laporan. 2. Memperkuat koordinasi antara Sub Bagian Keuangan dengan bidang terkait agar data keuangan lebih cepat terkonsolidasi. 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi keuangan daerah untuk mempercepat proses input dan verifikasi data. 4. Melakukan pendampingan teknis bagi petugas pelaporan guna memastikan ketepatan waktu dan akurasi laporan keuangan.

3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dibagi target ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dikali 100%	100	Rp28.816.000	42,86	42,86%	Rp25.181.800	87,39%	71,43	71,43%	Rp25.181.800	87,39%	85,71	85,71%	Rp25.181.800	87,39%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	2	Rp4.444.000	1	50,00%	Rp4.444.000	100,00%	1	50,00%	Rp4.444.000	100,00%	2	100,00%	Rp4.444.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dapat direalisasikan pada bulan Oktober sesuai anggaran kas	Melakukan persiapan tahap awal untuk memastikan proses administrasi (RUP, HPS, dokumen lelang/penunj ukan langsung) sampai dengan selesai	1. Melakukan verifikasi dan finalisasi dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah agar sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku. 2. Memastikan seluruh proses administrasi pendukung (RUP, HPS, dan dokumen pelaksanaan) tersusun lengkap dan tepat waktu. 3. Melaksanak an koordinasi dengan bagian perencanaan dan aset daerah untuk sinkronisasi data kebutuhan barang milik daerah.4. 4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah dapat disahkan dan diinput tepat waktu sesuai jadwal.
2				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	jumlah laporan terkait penatausahaan barang milik daerah	5	Rp24.372.000	2	40,00%	Rp20.737.800	85,09%	4	80,00%	Rp20.737.800	85,09%	2	40,00%	Rp20.737.800	85,09%	Kepala Sub Bag Umpeg			
4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian PD dibagi target ketersediaan penunjang administrasi PD dikali 100%	100	Rp109.080.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	303	Rp109.080.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
				Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg			
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang	%	Reakisasi ketersediaan penunjang administrasi umum	100	Rp431.030.032	60,00	60,00%	Rp215.536.308	50,00%	70,00	70,00%	Rp244.596.919	56,75%	82,35	82,35%	Rp274.678.862	63,73%	Kepala Sub Bag Umpeg			

					administrasi umum perangkat daerah		PD dibagi Target ketersediaan penunjang administrasi umum PD dikali 100%																		
1				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2	Rp90.361.832	1	50,00%	Rp43.445.808	48,08%	1	50,00%	Rp60.126.619	66,54%	2	100,00%	Rp63.125.179	69,86%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	Rp2.389.300	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor	1	Rp45.578.800	1	100,00%	Rp26.354.400	57,82%	1	100,00%	Rp29.734.200	65,24%	1	100,00%	Rp29.734.200	65,24%	Kepala Sub Bag Umpeg			
4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	Rp45.591.900	1	100,00%	Rp22.884.800	50,19%	1	100,00%	Rp22.884.800	50,19%	1	100,00%	Rp32.208.183	70,64%	Kepala Sub Bag Umpeg			
5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Rp58.267.200	0	0,00%	Rp32.100.000	55,09%	0	0,00%	Rp36.100.000	61,96%	2	100,00%	Rp39.720.000	68,17%	Kepala Sub Bag Umpeg			
6				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Rp30.000.000	4	33,33%	Rp17.500.000	58,33%	5	41,67%	Rp22.500.000	75,00%	9	75,00%	Rp22.500.000	75,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Rp135.741.000	4	33,33%	Rp47.762.000	35,19%	5	41,67%	Rp47.762.000	35,19%	9	75,00%	Rp61.902.000	45,60%	Kepala Sub Bag Umpeg			
8				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doumen	jumlah dokumen pelaksanaan SPBE	3	Rp23.100.000	1	33,33%	Rp23.100.000	100,00%	1	33,33%	Rp23.100.000	100,00%	3	100,00%	Rp23.100.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan hasil pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Realisasi ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100%	100	Rp419.620.200	50	50,00%	Rp86.007.183	20,50%	50	50,00%	Rp86.007.183	20,50%	50	50,00%	Rp86.007.183	20,50%	Kepala Sub Bag Umpeg			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	jumlah unit kendaraan dinas jabatan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas lapangan	1	Rp42.237.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dapat direalisasikan pada bulan Oktober sesuai anggaran kas	Melakukan persiapan tahap awal untuk memastikan proses administrasi (RUP, HPS, dokumen lelang/penunjukan langsung) sampai dengan selesai	1. Melaksanakana koordinasi intensif dengan bagian pengadaan untuk memastikan seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan yang tenukur agar realisasi kegiatan dapat tercapai pada bulan Oktober sesuai anggaran kas. 3. Melakukan

																									monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres administrasi dan pelaksanaan pengadaan hingga tahap serah terima kendaraan.
2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	Jumlah unit sarana prasarana gedung kantor	19	Rp377.383.200	0	0,00%	Rp86.007.183	22,79%	0	0,00%	Rp86.007.183	22,79%	10	52,63%	Rp86.007.183	22,79%	Kepala Sub Bag Umpeg	kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya masih dalam tahap proses pelaksanaan	Melakukan monitoring terhadap progres penyedia untuk memastikan pengadaan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyedia barang untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal. 2. Mempercepat proses administrasi pengadaan agar serapan anggaran dapat meningkat sesuai target triwulan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak penyedia untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas barang yang diterima. 4. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pengadaan secara rutin sebagai dasar pengawasan dan tindak lanjut perbaikan.

7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Realisasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	100	Rp220.700.000	60,00	60,00%	Rp76.972.832	34,88%	75,50	75,50%	Rp91.831.175	41,61%	85,71	85,71%	Rp135.463.177	61,38%	Kepala Sub Bag Umpeg			
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Rp8.100.000	1	100,00 %	Rp6.100.000	75,31%	1	100,00 %	Rp6.100.000	75,31%	1	100,00 %	Rp6.100.000	75,31%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp96.000.000	4	33,33%	Rp48.572.832	50,60%	5	41,67%	Rp57.227.175	59,61%	9	75,00%	Rp65.413.177	68,14%	Kepala Sub Bag Umpeg			
3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	Rp116.600.000	1	50,00%	Rp22.300.000	19,13%	1	50,00%	Rp28.504.000	24,45%	2	100,00 %	Rp63.950.000	54,85%	Kepala Sub Bag Umpeg	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor masih dalam tahap proses pelaksanaan	Melakukan monitoring berkala terhadap kegiatan untuk memastikan kegiatan tepat waktu.	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal. 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak penyedia jasa agar proses penyediaan layanan berjalan efektif dan tepat waktu. 3. Mempercepat penyelesaian administrasi dan pelaporan kegiatan guna mendukung realisasi anggaran. 4. Menjaga kualitas layanan agar sesuai dengan standar pelayanan umum kantor yang telah ditetapkan.
8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	Realisasi ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dibagi target	100	Rp783.416.071	66,50	66,50%	Rp319.415.450	40,77%	70,40	70,40%	Rp356.328.450	45,48%	73,68	73,68%	Rp423.327.400	54,04%	Kepala Sub Bag Umpeg			

							ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dikali 100%																		
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	Rp219.628.075	2	40,00%	Rp126.757.575	57,71%	2	40,00%	Rp134.682.575	61,32%	3	60,00%	Rp163.059.325	74,24%	Kepala Sub Bag Umpeg			
2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14	Rp316.947.996	5	35,71%	Rp179.237.875	56,55%	6	42,86%	Rp198.305.875	62,57%	12	85,71%	Rp230.218.075	72,64%	Kepala Sub Bag Umpeg			
3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit peliharaan dan mesin lainnya yg dipelihara	37	Rp26.840.000	15	40,54%	Rp13.420.000	50,00%	17	45,95%	Rp13.420.000	50,00%	27	72,97%	Rp20.130.000	75,00%	Kepala Sub Bag Umpeg			
4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah unit bangunan dan gedung yang dipelihara	1	Rp220.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp9.920.000	4,51%	0	0,00%	Rp9.920.000	4,51%	Kepala Sub Bag Umpeg	Progres kegiatan masih dalam tahap pengerjaan, sehingga realisasi anggaran belum sepenuhnya tercapai.	Monitoring dan evaluasi rutin di lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan dan progres sesuai rencana.	1. Melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakann monitoring dan evaluasi rutin di lapangan untuk memastikan progres dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak pelaksana agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 4. Menyusun laporan perkembangan kegiatan secara berkala untuk mendukung percepatan realisasi anggaran.
B	Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum				Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	100	Rp5.462.037.700	54,80	54,80%	Rp2.960.753.244	54,21%	60,50	60,50%	Rp2.925.639.776	53,56%	70,00	70,00%	Rp3.541.611.308	64,84%	Kepala SatpolPP			
2		Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	Jumlah perda atau perkara yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100	Rp5.462.037.700	20	20,00%	Rp2.960.753.244	54,21%	50,00	50,00%	Rp2.925.639.776	53,56%	72,22	72,22%	Rp3.541.611.308	64,84%	Kepala SatpolPP			

				PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam kab/kota yang ditangani	%	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang masuk dikali 100%	100	Rp5.462.03 7.700	47,59	47,59%	Rp2.960.7 53.244	54,21%	50,24	50,24%	Rp2.925.6 39.776	53,56%	70,00	70,00%	Rp3.541.61 1.308	64,84%	Kepala PPPU dan Trantib			
9				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	Pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SatpolPP dikali 100%	100	Rp5.281.81 1.300	34,12	34,12%	Rp2.906.2 78.244	55,02%	44,71	44,71%	Rp2.862.2 64.776	54,19%	42,68	42,68%	Rp3.478.23 6.308	65,85%	Kepala Seksi Dalop			
					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	Jumlah petugas Linmas di Daerah yang tersedia dibagi 1 wilayah kerja Kota (55 Linmas x 67 Kelurahan) dikali 100%	100		0	0,00%		#DIV/0!	0	0,00%		#DIV/0!	57,45	57,45%		#DIV/0!	Kepala Seksi Linmas			
1				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp9.006.00 0	0	0,00%	Rp4.056.0 00	45,04%	0	0,00%	Rp5.706.0 00	63,36%	1	100,00 %	Rp8.181.00 0	90,84%	Kepala Seksi Linmas			
2				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp39.451.0 00	0	0,00%	Rp37.901. 000	96,07%	0	0,00%	Rp37.901. 000	96,07%	1	100,00 %	Rp37.901.0 00	96,07%	Kepala Seksi Linmas			
3				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	Jumlah Petugas Satpol PP dan Linmas yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai Standard	139	Rp144.085. 800	0	0,00%	Rp38.235. 600	26,54%	0	0,00%	Rp38.235. 600	26,54%	79	56,83%	Rp38.235.6 00	26,54%	Kepala Seksi SDA	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dapat direalisasikan pada bulan Oktober sesuai anggaran kas.	Mempersiapk an kegiatan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan di bulan oktober	1. Melakukan percepatan persiapan teknis dan administrasi agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai tepat waktu pada bulan Oktober. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan rinci untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sesuai target. 3. Mengoptimal kan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan agar hasil kegiatan sesuai standar dan target kinerja tercapai.
4				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan	3	Rp4.248.62 3.900	1	33,33%	Rp2.531.3 67.244	59,58%	1	33,33%	Rp2.558.0 53.776	60,21%	3	100,00 %	Rp3.171.55 0.308	74,65%	Kepala Seksi Dalop			

				dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		kemitraan yang tersedia																		
5				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan KetenteramanMasya rakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteramandan Ketertiban Umum yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dibuat dan Dimutakhirkan	1	Rp1.825.000	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00 %	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Dalop			
6				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	17	Rp109.768.600	7	41,18%	Rp58.468.400	53,27%	8	47,06%	Rp62.918.400	57,32%	13	76,47%	Rp62.918.400	57,32%	Kepala Seksi Dalop	Sub kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, di mana kegiatan fisik seperti patroli, pembinaan, dan pengamanan sudah berjalan secara rutin hingga triwulan III. Saat ini hanya tersisa 10 kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.	Monitoring berkala terhadap pelaksanaan sisa kegiatan agar target kinerja dan anggaran tercapai sesuai rencana.	1. Melaksana n monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sisa kegiatan pada Triwulan IV. 2. Memastikan seluruh kegiatan patroli, pembinaan, pengamanan , dan pengawalan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Mengoptimal kan koordinasi internal untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dan pelaporan hasil pelaksanaan. 4. Menyusun laporan realisasi secara tepat waktu agar capaian kinerja dan serapan anggaran mencapai target tahun berjalan.
7				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	153	Rp692.224.400	20	13,07%	Rp135.150.000	19,52%	25	16,34%	Rp157.850.000	22,80%	85	55,56%	Rp157.850.000	22,80%	Kepala Seksi Dalop	1. Adanya dana hibah sebesar Rp200.000.000 yang baru dialokasikan pada saat perubahan anggaran. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah tersebut baru dapat direalisasikan pada bulan Oktober, sehingga progres penyerapan pada triwulan sebelumnya belum tampak optimal. 2. Selain itu, sisa kegiatan rutin baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan IV sesuai dengan anggaran kas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran terkonsentrasi di akhir tahun.	Realisasi kegiatan tetap dipastikan dapat berjalan sesuai target, mengingat jadwal kegiatan sudah ditetapkan dan persiapan teknis telah dilakukan.	1. Memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah setelah alokasi anggaran diterima pada perubahan anggaran. 2. Menyusun jadwal rinci dan memastikan pelaksanaan kegiatan rutin sesuai rencana pada Triwulan IV. 3. Mengoptimal kan koordinasi antar bidang terkait untuk mempercepat realisasi kegiatan di lapangan. 4. Melakukan

																									monitoring intensif terhadap pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran dan capaian kinerja sesuai dengan target akhir tahun.
8				Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Jumlah laporan layanan yang terkena dampak gangguanTrantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaranPerda dan Perkada yang tersedia	1	Rp20.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Dalop			
9				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKetentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum sesuai Standard	64	Rp16.826.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Dalop	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengalami pergeseran jadwal pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen perencanaan, proses administrasi pengadaan, serta pengalokasian dana dalam anggaran kas.	Kegiatan ini telah dijadwalkan kembali untuk dilaksanakan pada bulan Oktober, sehingga serapan anggaran tetap dapat tercapai sesuai dengan target triwulan IV.	1. Menyelesaikan proses penyesuaian dokumen perencanaan dan administrasi pengadaan sesuai penambahan anggaran. 2. Mempercepat proses administrasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. 3.
10				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perkada	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dibagi jumlah pelanggaran PERDA/PERKADA dikali 100%	100	Rp172.926.400	56,25	56,25%	Rp49.750.000	28,77%	56,25	56,25%	Rp58.650.000	33,92%	56,25	56,25%	Rp58.650.000	33,92%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan			

1				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggran Perda/Perkada	4	Rp90.926.400	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan	Sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat direalisasikan pada bulan Oktober sesuai anggaran kas	Persiapan teknis, koordinasi lintas sektor, serta monitoring kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Melaksanakan persiapan teknis kegiatan dengan ketentuan SOP. 2. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci agar sesuai dengan rencana anggaran kas bulan Oktober. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada untuk memastikan efektivitas dan ketepatan waktu kegiatan.
2				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perda/Perkada	12	Rp82.000.000	4	33,33%	Rp49.750.000	60,67%	5	41,67%	Rp58.650.000	71,52%	9	75,00%	Rp58.650.000	71,52%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan			
11				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	%	Jumlah PPNS terbina dibagi jumlah target PPNS terbina dikali 100%	100	Rp7.300.000	100	100,00%	Rp4.725.000	64,73%	100	100,00%	Rp4.725.000	64,73%	100	100,00%	Rp4.725.000	64,73%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan			
1				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PPNS	1	Rp7.300.000	1	100,00%	Rp4.725.000	64,73%	1	100,00%	Rp4.725.000	64,73%	1	100,00%	Rp4.725.000	64,73%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan			
C	Meningkatkan kualitas penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran yang dipenuhi dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang harus dipenuhi dikali 100%	100	Rp2.541.216.540	30,23	30,23%	Rp1.446.396.652	56,92%	40,76	40,76%	Rp1.495.498.764	58,85%	75,00	75,00%	Rp1.799.443.375	70,81%	Kepala SatpolPP			

		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan + Persentase Capaian Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	100	Rp2.541.216.540	10	10,00%	Rp1.446.396.652	56,92%	20	20,00%	Rp1.495.498.764	58,85%	75,00	75,00%	Rp1.799.443.375	70,81%	Kepala SatpolPP				
III			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Jangkauan luas WMK dibagi luas wilayah kota dikali 100%	100	Rp2.541.216.540	68,20	68,20%	Rp1.446.396.652	56,92%	71,60	71,60%	Rp1.495.498.764	58,85%	75,00	75,00%	Rp1.799.443.375	70,81%	Kepala Bid Damkar				
12				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	100	Rp625.014.440	87,71	87,71%	Rp368.835.900	59,01%	90,00	90,00%	Rp397.273.700	63,56%	97,85	97,85%	Rp420.153.999	67,22%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
1				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Jumlah Dokumen NSPM/SOP/Kajian dan Pelaksanaanya	1	Rp1.825.000	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Pencegahan				
2				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kejadian dan Penyelamatan Kasus kebakaran dan Non Kebakaran	1	Rp117.600.000	1	100,00%	Rp80.080.000	68,10%	1	100,00%	Rp84.980.000	72,26%	1	100,00%	Rp84.980.000	72,26%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan				
3				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Jumlah Dokumen Satandarisasi Sarana dan Prasarana Damkar	1	Rp444.400.640	1	100,00%	Rp242.231.550	54,51%	1	100,00%	Rp265.769.350	59,80%	1	100,00%	Rp288.649.649	64,95%	Kepala Seksi Pencegahan				
4				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Jumlah Petugas Damkar yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan /Standard	70	Rp15.487.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	70	100,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pencegahan	Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan terakhir kegiatan pembinaan dilakukan pada tanggal 30 September. dari sisi administrasi anggaran, pelaksanaan kegiatan masih berada dalam proses pengajuan realisasi.	Menunggu proses verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.	1. Melengkapi seluruh dokumen administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan sesuai ketentuan. 2. Mempercepat proses verifikasi administrasi agar realisasi anggaran dapat segera dilakukan. 3. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk memastikan percepatan	

																									pencairan dan penyerapan anggaran. 4. Menyusun laporan akhir kegiatan pembinaan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan kegiatan serupa di periode berikutnya.
5				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi SKIK	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Seksi Pencegahan			
6				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/Standard	19	Rp43.051.800	0	0,00%	Rp42.274.350	98,19%	0	0,00%	Rp42.274.350	98,19%	19	100,00%	Rp42.274.350	98,19%	Kepala Seksi Pencegahan			
7				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar DaerahBerbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan PenyelamatanNon Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerjasama pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran yang tersedia	1	Rp2.650.000	0	0,00%	Rp2.650.000	100,00%	0	0,00%	Rp2.650.000	100,00%	0	0,00%	Rp2.650.000	100,00%	Kepala Seksi Pencegahan			
13				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan proteksi kebakaran	%	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran dibagi jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran dikali 100%	100	Rp22.682.100	57,14	57,14%	Rp10.900.000	48,06%	57,14	57,14%	Rp19.900.000	87,73%	57,14	57,14%	Rp22.180.000	97,79%	Kepala Seksi Pencegahan			
1				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan bangunan/Gedung/Lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran	20	Rp11.152.100	0	0,00%	Rp10.900.000	97,74%	20	100,00%	Rp10.900.000	97,74%	10	50,00%	Rp10.900.000	97,74%	Kepala Seksi Pencegahan			
2				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran	15	Rp11.530.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp9.000.000	78,06%	10	66,67%	Rp11.280.000	97,83%	Kepala Seksi Pencegahan			
14				Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi terhadap kejadian kebakaran	%	Jumlah kejadian kebakaran yang dilakukan terinvestigasi lanjutan dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100%	100	Rp1.100.000	100	100,00%	Rp1.100.000	100,00%	100	100,00%	Rp1.100.000	100,00%	100	100,00%	Rp1.100.000	100,00%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan			
1				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil	Dokumen	Jumlah Dokumen yang memuat hasil	2	Rp1.100.000	0	0,00%	Rp1.100.000	100,00%	0	0,00%	Rp1.100.000	100,00%	2	100,00%	Rp1.100.000	100,00%	Kepala Seksi Pemadaman			

				Penelitian danPengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian		investigasi kejadian kebakaran															dan Penyelamatan			
15				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyakat dalam Lingkup Sitem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	%	Jumlah SKKL yang sudah dilakukan pemberdayaan yang dibentuk dan atau dibawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PD dibagi Jumlah SKKL dikali 100%	100	Rp1.892.420.000	55,01	55,01%	Rp1.065.560.752	56,31%	59,50	59,50%	Rp1.077.225.064	56,92%	63,83	63,83%	Rp1.356.009.376	71,65%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan			
1				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan pemadam kebakaran lingkup SKKL	120	Rp1.821.771.800	40	33,33%	Rp1.062.131.752	58,30%	50	41,67%	Rp1.073.796.064	58,94%	120	100,00%	Rp1.352.580.376	74,25%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan			
2				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Jumlah SKKL lingkup Kelurahan yang sudah terbentuk dan Terbina Relawan Kebakaran	67	Rp67.126.200	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan	Keterlambatan realisasi terjadi karena proses rekrutmen relawan membutuhkan waktu untuk verifikasi, seleksi, serta konsolidasi di lapangan agar jumlah Redkar benar-benar sesuai kebutuhan. Akibatnya, kegiatan pembinaan yang direncanakan belum dapat segera direalisasikan.	Pelaksanaan pelatihan Redkar dijadwalkan pada tanggal 30 Oktober 2025, sehingga proses pembinaan dapat terlaksana dan penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	= 3. Melaksanakana pelatihan dan pembinaan Redkar sesuai jadwal pada tanggal 30 Oktober 2025. 4. Memastikan seluruh hasil kegiatan terdokumentasi untuk mendukung pelaporan dan penyerapan anggaran tepat waktu.
3				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan PemadamKebakara n Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Dokumen	Jumlah Dokumen yang memuat SKKL lingkup Kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras Damkar	1	Rp3.522.000	0	0,00%	Rp3.429.000	97,36%	0	0,00%	Rp3.429.000	97,36%	1	100,00%	Rp3.429.000	97,36%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Urusan						%		26,60	Rp 378.584.763,77	11,89	44,69%	Rp 185.608.686,74	49,03%	14,45	54,34%	Rp 197.770.125,37	52,24%	14,87	55,93%	Rp 233.352.471,48	61,64%				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Urusan						%		100,00	Rp 1.259.913.332,43	59,73	59,73%	Rp 607.807.652,43	48,24%	65,06	65,06%	Rp 655.723.556,93	52,05%	72,79	72,79%	Rp 769.141.694,57	61,05%				
Jumlah dan Rata-rata Capaian Kinerja Program pada Urusan						%		95,00	Rp 5.915.955.551,33	55,30	58,21%	Rp 2.836.435.711,33	47,95%	58,78	61,87%	Rp 3.060.043.265,67	51,73%	68,67	72,28%	Rp 3.589.327.908,00	60,67%				
Predikat Kinerja																									

Serang, 6 Oktober 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG



Drs. H. HADI

Pembina Utama Muda. IV c

NIP. 19700518.199006.1.001

LAPORAN EVALUASI KINERJA SATPOLPP KOTA SERANG TAHUN 2025 TRIWULAN IV

N O	TUJUAN STRATE GIS	SASARA N STRATE GIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TRIWULAN IV												UNIT PENANGGUNGJ AWAB	PERMASAL AHAN	SOL USI	RENCANA PERBAIKAN	KETERANGAN	
									OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER									
									KINERJA ANGGARAN				KINERJA ANGGARAN				KINERJA ANGGARAN									
									K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)						K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/9* 100	13	14=13/10 *100	15	16=15/9* 100	17	18=17/10 *100	19	20=19/9* 100	21	22=21/10 *100	23	24	25		
Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat						%		91,9 6	Rp17.797.01 2.954	85, 00	92,43%	Rp12.811.93 2.546	71,99%	89,3 3	97,14%	Rp13.685.83 0.217	76,90%	91,9 6	100,00%	Rp15.612.65 5.804	87,73%	Kepala SatpolPP				
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SatpolPP				Nilai Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Nilai	Nilai Hasil Penilaian SAKIP Satpol PP (0-100)	75,8 9	Rp9.793.758 .714	70, 00	92,24%	Rp6.540.046 .419	66,78%	73,0 0	96,19%	Rp7.190.548 .146	73,42%	75,8 9	100,00%	Rp7.969.699 .889	81,38%	Kepala SatpolPP				
1		Meningkatnya Capaian Kinerja Utama SatpolPP			Rata - Rata Tingkat Capaian IKU SatpolPP	Nilai	Nilai Hasil Capaian IKU Satpol PP (0-100)	95,4 8	Rp9.793.758. 714	75, 00	78,55%	Rp6.540.046. 419	66,78%	80,0 0	83,79%	Rp7.190.548. 146	73,42%	95,4 8	100,00%	Rp7.969.699. 889	81,38%	Kepala SatpolPP				
B	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum				Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	100	Rp5.462.037 .700	90, 00	90,00%	Rp4.208.427 .840	77,05%	95,0 0	95,00%	Rp4.315.135 .372	79,00%	100	100,00%	Rp5.160.731 .704	94,48%	Kepala SatpolPP				
2		Menurunnnya pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	Jumlah perda atau perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100	Rp5.462.037. 700	80	80,00%	Rp4.208.427. 840	77,05%	90,0 0	90,00%	Rp4.315.135. 372	79,00%	100	100,00%	Rp5.160.731. 704	94,48%	Kepala SatpolPP				
C	Meningkatkan kualitas penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakara n				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran yang dipenuhi dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang harus dipenuhi dikali 100%	100	Rp2.541.216 .540	95, 00	95,00%	Rp2.063.458 .287	81,20%	100, 00	100,00%	Rp2.180.146 .699	85,79%	100	100,00%	Rp2.482.224 .211	97,68%	Kepala SatpolPP				
3		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakara n			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan + Persentase Capaian Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	100	Rp2.541.216. 540	90	90,00%	Rp2.063.458. 287	81,20%	95	95,00%	Rp2.180.146. 699	85,79%	100	100,00%	Rp2.482.224. 211	97,68%	Kepala SatpolPP				
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEBUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesk sekretariatan	Poin	Skor hasil survai	85	Rp9.793.758 .714	75, 00	88,24%	Rp6.540.046 .419	66,78%	80,0 0	94,12%	Rp7.190.548 .146	73,42%	85	100,00%	Rp7.969.699 .889	81,38%	Sekretaris				
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dibagi Target ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dikali 100%	100	Rp236.648.6 00	80, 00	80,00%	Rp166.274.4 60	70,26%	90,0 0	90,00%	Rp171.395.4 60	72,43%	100	100,00%	Rp185.459.0 60	78,37%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD (Rentra, Renja beserta perubahannya, IKU dan PK	5	Rp97.146.30 0	4	80,00%	Rp94.253.80 0	97,02%	5	100,00%	Rp94.253.80 0	97,02%	5	100,00%	Rp94.981.80 0	97,77%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				

2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Rp9.489.000	0	0,00%	Rp5.840.000	61,54%	1	100,00%	Rp9.441.000	99,49%	1	100,00%	Rp9.441.000	99,49%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
3					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp7.536.600	1	100,00%	Rp7.493.800	99,43%	1	100,00%	Rp7.493.800	99,43%	1	100,00%	Rp7.493.800	99,43%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
4					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Rp4.711.100	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	100,00%	Rp4.711.100	100,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
5					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Rp4.711.100	1	100,00%	Rp4.659.100	98,90%	1	100,00%	Rp4.659.100	98,90%	1	100,00%	Rp4.659.100	98,90%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja (Evlap Renja, LKJIP dan lainnya) laporan koordinasi capaian kinerja	7	Rp65.054.500	4	57,14%	Rp54.027.760	83,05%	7	100,00%	Rp55.547.760	85,39%	7	100,00%	Rp64.172.260	98,64%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 760.000,00
7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Laporan	Jumlah dokumen profil PD	1	Rp48.000.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	100,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 48.000.000
2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dibagi Target ketersediaan dokumen administrasi keuangan PD dikali 100%	100	Rp7.534.916.511	80,00	80,00%	Rp4.828.164.705	64,08%	90,00	90,00%	Rp5.360.667.560	71,14%	100	100,00%	Rp5.924.665.719	78,63%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah ASN yang termuat dalam dokumen penerimaan gaji dan TPP setiap bulannya	85	Rp7.458.921.811	85	100,00%	Rp4.769.187.605	63,94%	85	100,00%	Rp5.294.146.460	70,98%	85	100,00%	Rp5.851.008.619	78,44%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
2					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi	1	Rp9.994.700	1	100,00%	Rp9.937.100	99,42%	1	100,00%	Rp9.937.100	99,42%	1	100,00%	Rp9.937.100	99,42%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				
3					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semi steran dan laporan koordinasi	4	Rp66.000.000	1	25,00%	Rp49.040.000	74,30%	2	50,00%	Rp56.584.000	85,73%	4	100,00%	Rp63.720.000	96,55%	Kepala Sub Bag Keuangan dan PEP				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 2.280.000,00
3					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dibagi target ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah PD dikali 100%	100	Rp28.816.000	80,00	80,00%	Rp28.315.600	98,26%	90,00	90,00%	Rp28.315.600	98,26%	100	100,00%	Rp28.815.600	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
1					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	2	Rp4.444.000	2	100,00%	Rp4.444.000	100,00%	2	100,00%	Rp4.444.000	100,00%	2	100,00%	Rp4.444.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
2					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	jumlah laporan terkait penatausahaan barang milik daerah	5	Rp24.372.000	5	100,00%	Rp23.871.600	97,95%	5	100,00%	Rp23.871.600	97,95%	5	100,00%	Rp24.371.600	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				

4					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Realisasi ketersediaan penunjang administrasi kepegawaian PD dibagi target ketersediaan penunjang administrasi PD dikali 100%	100	Rp109.080.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	Rp109.080.000	0	#DIV/0!	Rp0	0,00%	0	#DIV/0!	Rp0	0,00%	0	#DIV/0!	Rp0	0,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 109.080.000,00
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg				
5					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang administrasi umum perangkat daerah	%	Reakisasi ketersediaan penunjang administrasi umum PD dibagi Terget ketersediaan penunjang administrasi umum PD dikali 100%	100	Rp447.361.332	80,00	80,00%	Rp326.239.662	72,93%	90,00	90,00%	Rp381.570.997	85,29%	100	100,00%	Rp421.242.897	94,16%	Kepala Sub Bag Umpeg				
1					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2	Rp106.693.132	1	50,00%	Rp64.623.679	60,57%	2	100,00%	Rp89.988.761	84,34%	2	100,00%	Rp106.320.061	99,65%	Kepala Sub Bag Umpeg				
2					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	Rp2.389.300	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	1	100,00%	Rp2.389.300	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
3					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor	1	Rp45.578.800	1	100,00%	Rp37.461.000	82,19%	1	100,00%	Rp45.187.800	99,14%	1	100,00%	Rp45.187.800	99,14%	Kepala Sub Bag Umpeg				
4					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	Rp45.591.900	1	100,00%	Rp34.177.183	74,96%	1	100,00%	Rp43.796.636	96,06%	1	100,00%	Rp45.530.236	99,86%	Kepala Sub Bag Umpeg				
5					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Rp58.267.200	2	100,00%	Rp43.320.000	74,35%	2	100,00%	Rp50.940.000	87,42%	2	100,00%	Rp57.710.000	99,04%	Kepala Sub Bag Umpeg				
6					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Rp30.000.000	10	83,33%	Rp25.000.000	83,33%	11	91,67%	Rp30.000.000	100,00%	12	100,00%	Rp30.000.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
7					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Rp135.741.000	10	83,33%	Rp96.168.500	70,85%	11	91,67%	Rp96.168.500	70,85%	12	100,00%	Rp111.005.500	81,78%	Kepala Sub Bag Umpeg				
8					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doumen	jumlah dokumen pelaksanaan SPBE	3	Rp23.100.000	3	100,00%	Rp23.100.000	100,00%	3	100,00%	Rp23.100.000	100,00%	3	100,00%	Rp23.100.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg				
6					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan hasil pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Realisasi ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100%	100	Rp419.620.200	80	80,00%	Rp376.384.978	89,70%	90	90,00%	Rp376.384.978	89,70%	100	100,00%	Rp418.534.978	99,74%	Kepala Sub Bag Umpeg				
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	jumlah unit kendaraan dinas jabatan	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Sub Bag Umpeg				
1					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas lapangan	1	Rp42.237.000	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	1	100,00%	Rp42.150.000	99,79%	Kepala Sub Bag Umpeg				
2					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	Jumlah unit sarana prasarana gedung kantor	6	Rp377.383.200	6	100,00%	Rp376.384.978	99,74%	6	100,00%	Rp376.384.978	99,74%	6	100,00%	Rp376.384.978	99,74%	Kepala Sub Bag Umpeg				
7					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Realisasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi target ketersediaan jasa	100	Rp233.900.000	80,00	80,00%	Rp161.485.205	69,04%	90,00	90,00%	Rp190.967.742	81,65%	100	100,00%	Rp227.707.576	97,35%	Kepala Sub Bag Umpeg				

							penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%																						
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Rp8.100.000	1	100,00%	Rp6.100.000	75,31%	1	100,00%	Rp8.100.000	100,00%	1	100,00%	Rp8.100.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg						
2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp109.200.000	10	83,33%	Rp74.143.205	67,90%	11	91,67%	Rp84.733.742	77,60%	12	100,00%	Rp104.181.576	95,40%	Kepala Sub Bag Umpeg						
3					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	Rp116.600.000	1	50,00%	Rp81.242.000	69,68%	1	50,00%	Rp98.134.000	84,16%	2	100,00%	Rp115.426.000	98,99%	Kepala Sub Bag Umpeg						
8					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	Realisasi ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dibagi target ketersediaan pemeliharaan BMD penunjang urusan PD dikali 100%	100	Rp783.416.071	80,00	80,00%	Rp653.181.809	83,38%	90,00	90,00%	Rp681.245.809	86,96%	100	100,00%	Rp763.274.059	97,43%	Kepala Sub Bag Umpeg						
1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	Rp219.628.075	3	60,00%	Rp170.984.325	77,85%	4	80,00%	Rp181.356.325	82,57%	5	100,00%	Rp211.675.975	96,38%	Kepala Sub Bag Umpeg						
2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14	Rp316.947.996	10	71,43%	Rp242.818.075	76,61%	12	85,71%	Rp260.510.075	82,19%	14	100,00%	Rp305.508.675	96,39%	Kepala Sub Bag Umpeg						
3					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit peliharaan dan mesin lainnya yg dipelihara	37	Rp26.840.000	28	75,68%	Rp20.130.000	75,00%	33	89,19%	Rp20.130.000	75,00%	37	100,00%	Rp26.840.000	100,00%	Kepala Sub Bag Umpeg						
4					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan gedung yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah unit bangunan dan gedung yang dipelihara	1	Rp220.000.000	1	100,00%	Rp219.249.409	99,66%	1	100,00%	Rp219.249.409	99,66%	1	100,00%	Rp219.249.409	99,66%	Kepala Sub Bag Umpeg						
II				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam kab/kota yang ditangani	%	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang masuk dikali 100%	100	Rp5.462.037.700	80,00	80,00%	Rp4.208.427.840	77,05%	90,00	90,00%	Rp4.315.135.372	79,00%	100	100,00%	Rp5.160.731.704	94,48%	Kepala PPPU dan Trantib							
9					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	Pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SatpolPP dikali 100%	100	Rp5.281.811.300	90,00	90,00%	Rp4.112.077.840	77,85%	95,00	95,00%	Rp4.209.885.372	79,71%	100	100,00%	Rp5.036.440.304	95,35%	Kepala Seksi Dalop						
					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	Jumlah petugas Linmas di Daerah yang tersedia dibagi 1 wilayah kerja Kota (55 Linmas x 67 Kelurahan) dikali 100%	100		0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%		0,00%	#DIV/0!	100	100,00%	#DIV/0!	Kepala Seksi Linmas								
1					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp9.006.000	1	100,00%	Rp9.006.000	100,00%	1	100,00%	Rp9.006.000	100,00%	1	100,00%	Rp9.006.000	100,00%	Kepala Seksi Linmas						
2					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat	1	Rp39.451.000	1	100,00%	Rp37.901.000	96,07%	1	100,00%	Rp37.901.000	96,07%	1	100,00%	Rp37.901.000	96,07%	Kepala Seksi Linmas						
3					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	Orang	Jumlah Petugas Satpol PP dan Linmas yang mengikuti peningkatan	139	Rp144.085.800	139	100,00%	Rp38.235.600	26,54%	139	100,00%	Rp38.235.600	26,54%	139	100,00%	Rp38.235.600	26,54%	Kepala Seksi SDA						*masuk dalam pencadangan pagu

				Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Ditingkatkan Kapasitasnya		kapasitas sesuai Standard																	anggaran OPD TA. 2025 sebesar 104.677.465,00		
4				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertnaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan yang tersedia	3	Rp4.248.623.900	3	100,00%	Rp3.491.896.840	82,19%	3	100,00%	Rp3.551.053.372	83,58%	3	100,00%	Rp4.166.649.904	98,07%	Kepala Seksi Dalop				
5				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan KetenteramanMasyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteramandan Ketertiban Umum yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dibuat dan Dimutakhirkan	1	Rp1.825.000	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Dalop				
6				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	17	Rp109.768.600	14	82,35%	Rp63.918.400	58,23%	15	88,24%	Rp63.918.400	58,23%	17	100,00%	Rp99.768.400	90,89%	Kepala Seksi Dalop				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 9.000.000,00
7				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Jumlah kasus gangguan trantibum yang ditangani melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	153	Rp692.224.400	153	100,00%	Rp289.420.000	41,81%	153	100,00%	Rp508.171.000	73,41%	153	100,00%	Rp666.526.400	96,29%	Kepala Seksi Dalop				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 21.000.000,00
8				Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Jumlah laporan layanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang tersedia	0	Rp20.000.000	0	#DIV/0!	Rp0	0,00%	0	#DIV/0!	Rp0	0,00%	0	#DIV/0!	Rp0	0,00%	Kepala Seksi Dalop				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 20.000.000,00
9				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKetentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteramandan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum sesuai Standard	64	Rp16.826.600	0	0,00%	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp0	0,00%	64	100,00%	Rp16.753.000	99,56%	Kepala Seksi Dalop				
10				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda/Perkada	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA/PERKADA dibagi jumlah pelanggaran PERDA/PERKADA dikali 100%	100	Rp172.926.400	80,00	80,00%	Rp90.050.000	52,07%	90,00	90,00%	Rp98.950.000	57,22%	100	100,00%	Rp117.991.400	68,23%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
1				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	4	Rp90.926.400	4	100,00%	Rp22.250.000	24,47%	4	100,00%	Rp22.250.000	24,47%	4	100,00%	Rp36.866.400	40,55%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				*masuk dalam pencadangan pagu anggaran OPD TA. 2025 sebesar 44.960.000,00
2				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelanggaran Perda/Perkada	12	Rp82.000.000	10	83,33%	Rp67.800.000	82,68%	11	91,67%	Rp76.700.000	93,54%	12	100,00%	Rp81.125.000	98,93%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
11				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik (PPNS) yang terbina	%	Jumlah PPNS terbina dibagi jumlah target PPNS terbina dikali 100%	100	Rp7.300.000	100	100,00%	Rp6.300.000	86,30%	100	100,00%	Rp6.300.000	86,30%	100	100,00%	Rp6.300.000	86,30%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				
1				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PPNS	1	Rp7.300.000	1	100,00%	Rp6.300.000	86,30%	1	100,00%	Rp6.300.000	86,30%	1	100,00%	Rp6.300.000	86,30%	Kepala seksi Penegakan Perundang-Undangan				

					Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada																						
II 1				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Jangkauan luas WMK dibagi luas wilayah kota dikali 100%	100	Rp2.541.216 .540	80, 00	80,00%	Rp2.063.458 .287	81,20%	90,0 0	90,00%	Rp2.180.146 .699	85,79%	100	100,00%	Rp2.482.224 .211	97,68%	Kepala Bid Damkar				
12				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	100	Rp625.014.4 40	80, 00	80,00%	Rp537.679.5 99	86,03%	90,0 0	90,00%	Rp580.934.7 99	92,95%	100	100,00%	Rp606.037.9 99	96,96%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan					
1				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Jumlah Dokumen NSPM/SOP/Kajian dan Pelaksanaanya	1	Rp1.825.000	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	1	100,00%	Rp1.600.000	87,67%	Kepala Seksi Pencegahan					
2				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kejadian dan Penyelamatan Kasus kebakaran dan Non Kebakaran	1	Rp117.600.0 00	1	100,00%	Rp110.055.0 00	93,58%	1	100,00%	Rp116.180.0 00	98,79%	1	100,00%	Rp116.180.0 00	98,79%	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan					
3				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Jumlah Dokumen Satandarisasi Sarana dan Prasarana Damkar	1	Rp444.400.6 40	1	100,00%	Rp365.859.6 49	82,33%	1	100,00%	Rp402.989.8 49	90,68%	1	100,00%	Rp428.093.0 49	96,33%	Kepala Seksi Pencegahan					
4				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Jumlah Petugas Damkar yang mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan/St andard	70	Rp15.487.00 0	70	100,00%	Rp15.240.60 0	98,41%	70	100,00%	Rp15.240.60 0	98,41%	70	100,00%	Rp15.240.60 0	98,41%	Kepala Seksi Pencegahan					
5				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran danPenyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelur ahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi SKIK	0	Rp0	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!	Kepala Seksi Pencegahan					
6				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan/Standard	19	Rp43.051.80 0	19	100,00%	Rp42.274.35 0	98,19%	19	100,00%	Rp42.274.35 0	98,19%	19	100,00%	Rp42.274.35 0	98,19%	Kepala Seksi Pencegahan					
7				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar DaerahBerbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulan, Penyelamatan Kebakaran dan PenyelamatanNon Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerjasama pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran yang tersedia	1	Rp2.650.000	1	100,00%	Rp2.650.000	100,00%	1	100,00%	Rp2.650.000	100,00%	1	100,00%	Rp2.650.000	100,00%	Kepala Seksi Pencegahan					
13				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan/Gedung/Li	%	Jumlah bangunan/gedung/lin	100	Rp22.682.10 0	80	80,00%	Rp22.180.00 0	97,79%	90,0 0	90,00%	Rp22.180.00 0	97,79%	100	100,00%	Rp22.180.00 0	97,79%	Kepala Seksi Pencegahan					

[illegible]

Serang, 2 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG**

Drs HERI HADI

Pembina Utama Muda, IV c

NIP. 19700518.199006.1.001